

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

**(Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Partisipasi Politik Perempuan di
Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam
Pemilu Legislatif tahun 2009)**



Oleh :

Muhammad Budi Nur Rohman

NIM : D 3205018

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Sosiologi**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Dosen Pembimbing

Drs. Argyo Demartoto, M.Si
NIP : 196508251992031003

LEMBAR PENGESAHAN

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

Panitia Penguji Skripsi :

1. Drs. H. Supriyadi, SN, SU (.....)
(NIP.195301281981031001) Ketua
2. Eva Agustinawati, S.Sos, M.Si (.....)
(NIP. 197008131995122001) Sekretaris
3. Drs. Argyo Demartoto, M.Si (.....)
(NIP. 196508251992031003) Penguji

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Dekan,

Drs. H. Supriyadi, SN, SU
NIP. 195301281981031001

MOTTO

*Hal-hal yang besar tidak terjadi secara mendadak
tetapi ia merupakan rangkaian dari hal-hal yang kecil*

(Mario Teguh)

*Kedewasaan Tidak Dilihat dari usia,
Tetapi dilihat dari bagaimana ia bertindak*

(Medio Surakarta-Yogyakarta)

Sopo nandur

Bakal Ngunduh

(Penulis)

Alon-alon

Waton kelakon

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta tulus ikhlas, dan dengan mengucap Syukur kepada Allah SWT segores karya sederhana ini dapat aku persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

yang telah memberikan kepercayaan Penuh sehingga terselesainya Skripsi ini. Atas

segala doa yang tak pernah terputus, bimbingan, kesabaran,

cinta kasih yang tulus dan

pelajaran hidup yang sangat berarti

Kakak-kakakku tercinta

yang telah ikut serta dalam memberikan dukungan

Sahabat jiwaku, @na R

Berbagi, peduli, memberi dan memaafkan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, terselesainya dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya bila pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Supriyadi, SN, SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kelonggaran dan memberikan ijin pada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Ibu Hj. Trisni Utami, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
3. Ibu Dra. L.V Ratna Devi S, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Drs Pandjang Sugiharjono, selaku Pembimbing Akedemik.
5. Bapak Drs. Argyo Demartoto, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan kelonggaran pada penulis dalam membaca dan meminjamkan buku-buku referensi yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Bapak Wardi selaku Kepala Kelurahan Jatipurno yang telah memberikan kelonggaran kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno.
8. Bapak serta Ibu staf Kantor Kelurahan Jatipurno dan bapak Ibu yang menjadi informan, yang telah banyak membantu serta memberikan informasi kepada penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan.
9. Ayah dan Bunda yang telah memberikan dorongan moral dan material sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
10. Mas Tri Kumoro Sakti, Teh Dwi, Mba Purwani, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang serta doa-doanya.
11. De @na yang selalu memberi semangat dan kasih sayangnya selama ini, I Mizz you.
12. Anak-anak Sosiologi non-reg 05 yang telah memberikan semangat dan doa-doanya. Mas Wahyu, Ryan, Rizky, Ana Salisa, Ana SRR, Diana, Atun, I-is, Mbak Titik dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang menemani Penulis mengisi hari-hari di bangku kuliah.
13. Woeng Pietou. Mas Pandhit, Mas Agung, Rikky Shoguners, Bayu, Melon, Tri Wahyono, kalian semua sudah Aku anggap seperti saudaraku, Bersahabat dengan

kalian semua sangat berarti bagi hidupku. Canda, tawa Wong 7 akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, karena kita sahabat Sejati.

14. Penghuni Kost “Arista Puri” : Mas Agung, Prima, Gendon, Insan, Endro.

Makasih atas rasa kekeluargaan dan kebersamaannya, dan menemani hari-hari Penulis selama ini dalam satu atap, sangat berarti bagi Penulis. Semoga kebersamaan ini akan tetap terasa hangat.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka dan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil karya ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR MATRIKS.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Landasan Teori.....	10
2. Konsep-konsep yang digunakan	14
a. Partisipasi	14
b. Partisipasi politik.....	24

c. Faktor pendorong seseorang berpartisipasi	30
d. Pemilihan Umum (Pemilu)	35
F. Definisi Konseptual	37
1. Partisipasi	37
2. Partisipasi Politik	38
3. Perempuan	38
4. Pemilu	38
G. Metodologi Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Lokasi Penelitian	39
3. Sumber Data	40
4. Teknik Pengumpulan Data	40
5. Teknik Pengambilan Sampel	43
6. Validitas Data	45
7. Teknik Analisa Data	46
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Keadaan Geografis	49
B. Keadaan Penduduk	52
C. Sarana dan Prasarana	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Profil Informan	64
2. Latar Belakang Perempuan Berpartisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009	69

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam berpartisipasi Politik.....	75
4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan..... Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009	81
5. Interaksi antara PPS dengan KPPS, Saksi dan warga..... Pemilih	98
B. Pembahasan.....	107
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Implikasi	123
1. Implikasi Empiris	123
2. Implikasi Teoritis	126
3. Implikasi Metodologis	128
C. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal..	2
Tabel 1.2	Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.....	3
Tabel 1.3	Posisi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Surakarta.....	6
Tabel 1.4	Perempuan yang terlibat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri tahun 2009	7
Tabel 2.1	Batas Wilayah Kelurahan Jatipurno.....	50
Tabel 2.2	Tata Guna Lahan di Kelurahan Jatipurno	51
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	53
Tabel 2.4	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	55
Tabel 2.5	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	56
Tabel 2.6	Keadaan Penduduk Menurut Agama	57
Tabel 2.7	Jumlah Sarana Pendidikan	58
Tabel 2.8	Jumlah Sarana Peribadatan	59
Tabel 2.9	Jumlah Sarana Kesehatan	60
Tabel 2.10	Jumlah Organisasi Sosial	61
Tabel 2.11	Jumlah Sarana Perhubungan	62
Tabel 2.12	Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Jatipurno Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009	63

DAFTAR MATRIKS

Matriks 3.1	Profil Informan.....	68
Matriks 3.2	Latar Belakang Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu.....	
	Legislatif tahun 2009	74
Matriks 3.3	Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009	79
Matriks 3.4	Bentuk Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009	97
Matriks 3.5	Interaksi antara PPS dengan KPPS, Saksi dan Warga pemilih	104
Matriks 3.6	Temuan Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009	118

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Model Analisis Interaktif	48
---------	---------------------------------	----

ABSTRAK

Muhammad Budi Nur Rohman, D3205018, Agustus 2009. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Legislatif tahun 2009).

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan dan ketertarikan penulis tentang bagaimana partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dari sudut pandang sosiologi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 11 informan, yaitu 2 PPS yang terdiri dari anggota dan Pelaksana Sekretariat, 4 KPPS yang terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang anggota, 1 warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu, 1 orang Saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta untuk validitas data peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 1 kepala Kelurahan Jatipurno, 1 kepala lingkungan di Dusun Kuryo dan 1 warga di Dusun Kuryo. Selain itu juga menggunakan observasi tak berperan dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode model analisis interaktif, validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. **Pertama**, Partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif. Sebagai syarat untuk bisa berpartisipasi atau menggunakan hak pilih dalam Pemilu yakni perempuan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti halnya harus Warga Negara Indonesia (WNI) serta yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. **Kedua**, partisipasi politik perempuan sebagai Panitia Pelaksanaan Pemilu. Sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan sebagai KPPS yakni penyelenggara Pemilu di TPS. **Ketiga**, partisipasi politik perempuan sebagai Saksi dalam proses pemungutan suara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi, sedangkan teori yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah teori yang terdapat dalam paradigma Definisi Sosial yakni teori aksi. Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teori yang digunakan dalam penelitian dimana pendekatan ini menekankan pada Partisipasi Politik perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Di dalam teori aksi menekankan pada tindakan sosial dari Max Weber dan memandang manusia (perempuan) adalah sebagai aktor yang kreatif dan realitas sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri sudah cukup baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan Negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya Pemilu hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.

Selama 9 kali melaksanakan Pemilu, perempuan yang jumlahnya separuh dari bangsa, sangat kurang terwakili secara meyakinkan di lembaga perwakilan rakyat, akibatnya kebijakan publik dan program pembangunan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan. Data menunjukkan perempuan tertinggal disegala bidang kehidupan dan kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemajuan seluruh bangsa.

Tingkat keterwakilan perempuan baik sebagai anggota partai politik maupun anggota parlemen DPR serta institusi formal politik lainnya di tingkat pusat maupun daerah belum memberikan harapan yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1**Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal**

Lembaga	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
MPR*	18	9,2	177	90,8	195
DPR*	45	9	455	91	500
MA*	7	14,8	40	85,2	47
BPK*	0	0	7	100	7
DPA*	2	4,4	40	95,6	42
KPU*	2	18,1	9	81,9	11
Gubernur (DATI I)*	0	0	30	100	30
Bupati (DATI II)*	5	1,5	331	98,5	336
Eselon I – II**	1.883	7	15.110	93	16.993
Hakim**	536	16,2	2.775	83,8	3.311
PTUN**	35	23,4	150	76,6	185

Sumber : * Data diolah dari Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO, 2001

** Pidato Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI pada Semiloka
“ Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilu”, 21 Juni 2001.

Sementara itu pada tabel 2 berikut ini disajikan data mengenai Tingkat Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI :

Tabel 1.2

Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Masa Kerja DPR	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPR Sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955- 1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante: 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (2,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)

Sumber : Jurnal Perempuan 19/2001 dari Sekretariat DPR RI, 2001.

Berdasarkan data-data diatas, maka secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Ini berarti keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dirasakan belum berimbang. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum maskulin kurang berperspektif gender, sehingga keputusan yang dihasilkan seringkali bias gender,

tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan, tidak membuat perempuan semakin berkembang.

Saat ini bangsa Indonesia sedang bersiap-siap menyelenggarakan Pemilu yang ke 10 dan memberikan suara kita pada tanggal 9 April 2009. Ini adalah kesempatan kita, termasuk perempuan, untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia memilih wakil kita yang akan menentukan masa depan bangsa dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik.

Namun kesempatan yang berharga ini diperlukan sebuah persiapan bagi perempuan basis, karena sistem Pemilu mengalami pembaruan, sedangkan pendidikan dan pengetahuan perempuan basis yang minim sehingga diperlukan pendidikan pemilih, diharapkan dari berbagai pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai-partai politik tidak hanya melakukan sosialisasi tapi juga untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan. Namun kenyataannya partai politik (parpol) di Indonesia sudah sejak dulu tidak menjalankan fungsi-fungsinya seperti melakukan pendidikan politik, komunikasi politik dan penengah konflik. Parpol di Indonesia hanya berperan sebagai alat pencari dan mengakumulasi kekuasaan. Meski dalam Undang-Undang no. 2 tahun 2008 mewajibkan parpol untuk melaksanakan pendidikan politik, namun kita tetap saja pesimis bahwa parpol akan menjalankan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik dengan baik.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil (civil society) dengan masif dan pendekatan yang tepat, akan berhasil dan bisa mendorong

pelembagaan demokrasi yang kokoh di Indonesia. Berdasarkan pengalaman di Pemilu di tahun 2004, pendekatan dialog di tingkat desa seluruh Indonesia adalah cara yang cukup efektif dalam melakukan pendidikan politik. Dengan dialog-dialog yang intensif maka rakyat khususnya perempuan akan semakin terdidik dan mengetahui dengan baik nilai-nilai demokratis, dimana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi yang prosedural (terpilih wakil rakyat dan pemimpin, tidak memperhatikan kepentingan rakyat) tetapi juga demokrasi yang substansial (yang kita pilih adalah orang yang berkualitas, memenuhi kebutuhan rakyat).

Dominasi kaum lelaki di ranah politik, boleh dibilang tidak berimbang. Apalagi dalam konteks dunia politik Indonesia. Peran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, persentasenya sangat memprihatinkan. Ibarat permainan sepakbola, laki-laki identik dengan pemain sepakbola, walaupun sepakbola wanita sudah ada, namun gemanya masih kurang. Begitu juga dengan kaum perempuan, politik ibarat hanya permainan seni kaum lelaki. Bagaimana mengubah image bahwa politik tidak hanya dunia lelaki?. Coba kita lihat data statistik separuh dari 6,1 miliar penduduk dunia adalah perempuan. Namun, berapa banyak perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di panggung politik ataupun kehidupan ekonomi? Pertanyaan ini sering terdengar. Fenomena yang dengan tajam disoroti adalah tidak sebandingnya jumlah wanita dunia dengan kekuatan suara memperjuangkan kepentingannya.

Dalam kaitannya dengan masalah yang diangkat mengenai partisipasi politik kaum perempuan terdapat suatu data yang menjelaskan dan menunjukkan

bagaimana posisi perempuan dalam masing-masing partai politik di Kota Surakarta. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Posisi Perempuan dalam Partai Politik
di Kota Surakarta

Jabatan dalam Partai Politik	PDIP	Partai Golkar	PAN	PKB	PBB	PKS	PPP	PDS
Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-
Wakil Ketua	-	1	1	-	1	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	-	-
Bendahara	-	1	2	-	-	3	2	-
Divisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemenangan Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-
Biro/ Divisi Perempuan	7	4	19	-	2	8	-	-
Total	7	7	23	-	3	11	2	-

Sumber : Data Primer KPU kota Surakarta 2004.

Data diatas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak satupun perempuan duduk sebagai “ top person “ dalam partai-partai politik besar pemenang Pemilihan Umum 1999 yang ada di kota Surakarta.

Sementara itu menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri 2009 terdapat sejumlah perempuan yang terlibat di KPU. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Perempuan yang terlibat di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Wonogiri 2009

No	Nama	Pendidikan	Alamat	Kedudukan
1	Dyah Ayu R.S	SLTA	Kuryo	PPS
2	Sunarsi	SLTA	Kedung Rejo	PPS
3	Winarni	SLTA	Pule	PPS
4	Resmawati	Sarjana	Kuryo	PPS
5	Setyaningsih Ariani	Sarjana	Kuryo	Anggota PPS

Sumber : Data KPU Kabupaten Wonogiri 2009

Angin segar pun bertiup bersama dengan lahirnya produk perundangan tentang Pemilu yang membuka peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Bagi kalangan tertentu, terobosan ini merupakan awal perjalanan perempuan untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/keputusan yang selama ini mereka rasakan masih terabaikan. Mereka berpandangan, dengan makin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik, diharapkan kebijakan publik dan kehidupan politik menjadi lebih baik. Pelayanan masyarakat lebih diperhatikan, lebih human, lebih bermartabat dan lebih adil.

B. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan secara menyeluruh dan kompherensif semua aspek yang terkait dengan eksistensi dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Pemilu dalam upayanya untuk meningkatkan peran perempuan dalam negara demokrasi dan mewujudkan kesetaraan gender, dengan mengambil kasus di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif?
2. Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri?
3. Mengetahui faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Jatipurno?

4. Siapa saja yang terlibat dalam partisipasi politik kaum perempuan di Kelurahan Jatipurno?

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian sederhana ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi organisasi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian empiris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kaum perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti serupa di masa yang akan datang serta mampu menambah body of knowledge.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image“ yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah

wanita yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “Lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah : sementara wanita bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme; sikap dan peran wanita khususnya, pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan, pekerjaan tertentu yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan laki-laki saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan oleh para wanita, termasuk pekerjaan kasar sekalipun. Walaupun wanita sudah terlibat ke sektor publik, namun jumlahnya masih relatif kecil. Hal ini sangat kontras dengan prosentase jumlah penduduk wanita Indonesia.

1. Landasan Teori

Penelitian tentang partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ini mengacu pada paradigma definisi sosial Max Weber.

Dalam hal ini mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksudkan tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau obyek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial. Kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama (*Ritzer, 2002:38*)

Tindakan sosial Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah untuk dipahami. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial tersebut Weber kemudian membedakannya ke dalam 4 tipe tindakan, yaitu :

1. *Zwerkrational*

Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya sendiri. Tujuan dari *zwerkrational* tidaklah absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor, akan mudah untuk memahami tindakan itu.

2. *Werkrational Action*

Dalam tindakan ini, aktor tidak dapat menentukan apakah cara-cara yang ia pakai merupakan cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan ataukah merupakan tujuan itu sendiri. Namun demikian tindakan ini rasional dan dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dipahami.

3. *Affectual Action*

Tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.

4. *Traditional Action*

Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja.

(Ritzer, 2002:44).

Didalam paradigma definisi sosial ada 3 teori yang termasuk didalamnya yaitu teori aksi (*action theory*), Interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) dan fenomenologi (*phenomenology*). Dalam teori aksi yang diterangkan oleh Parson tentang kesukarelaan (*Voluntarisme*). Dalam konsep ini, aktor adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif tindakan tersebut. Teori tindakan sosial atau teori aksi merupakan teori yang dikembangkan oleh Parsons. Ia memilih istilah *action* bukan *behaviour*, karena menurutnya mempunyai konotasi yang berbeda. *Behaviour* secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara mekanik antara perilaku (*respons*) dengan rangsangan (*stimulus*). Sedang istilah *action* menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan diri individu.

Menurutnya suatu teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan sifat-sifat subyektif tindakan manusia tidak termasuk ke dalam teori aksi. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu selaku aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pembawa tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya jenis kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Misalnya kebudayaan.

(Ritzer, 2002:48)

Aktor mengejar tujuan di dalam situasi di mana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan arah untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai *voluntarism*. Secara singkat *voluntarism* adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (Ritzer, 2002:49).

Aktor adalah perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif suatu tindakan, terdapat suatu pengalaman subyektif dan memilih alternatif suatu tindakan, terdapat suatu pengalaman

subyektif dalam diri si aktor. Suatu pengalaman subyektif yang dapat dimengerti karena dialami secara meluas, dapat dilihat secara obyektif.

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan secara subyektif. Tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. Kesemuanya, dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial.

2. Konsep-konsep yang Digunakan

a. Partisipasi

Perkataan partisipasi dari perkataan Inggris "to participate" yang mengandung pengertian "to make part" yang dalam bahasa Indonesia berarti "the act participating". Seseorang dikatakan berpartisipasi terhadap sesuatu usaha/organisasi apabila secara sadar ia ikut aktif mengambil bagian didalam kegiatan-kegiatan dan usaha tersebut.

Dalam kamus Sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya (*Kartasapoetra, 1992:16*).

Sedangkan Keith Davis mendefinisikan partisipasi sebagai berikut :

".... mental and emotional involment of person group situation which encourage responsibility in the..."

(Pernyataan mental dan emosi didalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikiran dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut) (*Davis, 1990:24*)

Dari definisi tersebut partisipasi mengandung pengertian :

1. Adanya penyertaan mental dan emosi. Didalam partisipasi dituntut lebih dari pada sekedar penyertaan fisik. Partisipasi merupakan proses penyertaan pikiran dan perasaannya dalam dinamika organisasi terutama dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi merupakan syarat bagi pengembangan diri para bawahan. Mereka diberi kesempatan mengutarakan pendapat sebagai subyek bukan sekedar obyek dalam pengambilan keputusan.
3. Partisipasi merupakan sarana untuk menumbuhkan dan mempertebal rasa "ikut memiliki" dikalangan bawahan. Bawahan berperan didalam setiap pengambilan keputusan merasa bahwa baik buruknya keputusan yang diambil mereka ikut bertanggung jawab karena pada hakekatnya mereka sendiri yang memutuskan.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, partisipasi adalah : "penyertaan mental dan emosi seseorang didalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk menyumbangkan ide, pikiran dan perasaan yang terciptanya tujuan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tertentu."(*Tjokrowinoto, 1978:29*)". Moeljarto Tjokrowinoto lebih menitik beratkan pada emosi seseorang dan agaknya kurang

memperhatikan segi fisik. Hal ini mungkin belum tentu dapat berlaku bagi kelompok yang berorientasi pada pemimpin.

Dengan adanya berbagai definisi partisipasi maka dapatkah ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterikatan mental dan emosi serta fisik seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab.

Dusseldorp mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Klasifikasinya didasarkan pada 9 Dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan derajat kesukarelaan

- a. Partisipasi bebas

Terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipatif bebas dapat di bedakan menjadi :

- a.1. Partisipasi spontan

Terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan-ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

- a.2. Partisipasi terbujuk

Bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok

tertentu. Partisipasi ini dapat dibagi menurut siapa yang membujuk, yakni :

- Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan masyarakat, gerakan koperasi, LSM/LPSM atau HKTI.
- Badan-badan sukarela diluar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan keagamaan.
- Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau golongan organisasi sukarela yang berbasiskan di dalam masyarakat seperti PKK, Kelompok Tani dan sebagainya.

b. Partisipasi terpaksa

Dapat terjadi dalam berbagai cara :

b.1. Partisipasi terpaksa oleh hukum

Terjadi bila orang-orang terpaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.

b.2. Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi.

2. Berdasarkan cara keterlibatan

a. Partisipasi langsung

Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi.

b. Partisipasi tidak langsung

Terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemilihan wakil-wakil di dalam DPR.

3. Berdasarkan tingkatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana

a. Partisipasi lengkap

Bila seorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana.

b. Partisipasi sebagian

Bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu.

4. Berdasarkan tingkatan organisasi

Dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Partisipasi yang terorganisasi

Terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan.

- b. Partisipasi yang tidak terorganisasi
Terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang hukumnya karena keadaan yang gawat, misalnya sewaktu terjadi kebakaran.
5. Berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan
- a. Partisipasi intensif
Terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang tinggi. Menurut Muller hal ini di ukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipasi.
 - b. Partisipasi ekstensif
Terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.
6. Berdasarkan lingkup liputan kegiatan
- a. Partisipasi tak terbatas
Yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawali oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tertentu.

b. Partisipasi terbatas

Terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administratif dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

7. Berdasarkan efektifitas

a. Partisipasi efektif

Yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktifitas partisipasi.

b. Partisipasi tidak efektif

Terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas yang dicanangkan terwujudnya.

8. Berdasarkan siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut

a. Anggota masyarakat setempat : penduduk setempat, pemimpin setempat.

b. Pegawai pemerintah : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk

c. Orang-orang luar : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk

d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi bujukan) atau dapat mengorganisir diri mereka berdasarkan dua prinsip, yaitu :

1. Perwilayahan, sifatnya homogen sejauh masih menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
2. Kelompok-kelompok sasaran, sifatnya homogen, sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.

9. Berdasarkan gaya partisipasi

Rothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat di dalam setiap model terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

a. Pembangunan lokalitas

Model praktek organisasi ini sama dengan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai fungsi integratif.

b. Perencanaan sosial

Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah

untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial dapat dicirikan seperti disebutkan oleh Arstein sebagai informan atau placatiaon. Akan tetapi adalah juga bahwa partisipasi berkembang ke dalam bentuk partnership atau perwakilan kekuasaan.

c. Aksi sosial

Tujuan utama dari tipe partisipasi ini adalah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan partisipasi diantaranya kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting (*Slamet, 1993:10-21*).

Jadi, partisipasi masyarakat adalah : keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha pencapaian tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab. Penelitian ini akan meneliti masyarakat menurut tipe partisipasi. Partisipasi masyarakat akan dilihat dari partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, cara keterlibatan, efektifitas, serta siapa yang terlibat. Adapun klasifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan.

Dalam proses partisipasi masyarakat dalam suatu program setidaknya secara garis besar ada tiga tahapan dalam partisipasi menurut ceramahnya berserial tentang *Development*, Prof. Dr. Eugene.C.Ericson dari Cornell University di Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan (yang sekarang bernama Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan / P3PK) yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Dalam proses ini orang sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang dimaksud keputusan adalah menunjang secara tidak langsung seperangkat aktifitas tingkah laku yang lebih luas dan bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di antara berbagai alternatif. Dalam hal kegiatan partisipatif perencanaan pembangunan mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target, merumuskan program-program, menilai apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber biayanya, yang ringkasnya dapat disebut menyiapkan rencana. Dalam banyak hal membuat keputusan adalah sejajar dengan menyiapkan rencana.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Pengukurannya adalah bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat di dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan, didalam kegiatan-kegiatan fisik. Dengan demikian pengukurannya adalah

sejauh mana masyarakat telah memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan program

Adalah partisipasi masyarakat dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

b. Partisipasi politik

Dalam literatur Sosial Politik di dapat banyak definisi mengenai partisipasi politik. Nie dan King (1978) mendefinisikan partisipasi politik adalah aktifitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya (Prihatmoko, 2003:182-183). Hal ini bisa di lakukan dengan kegiatan-kegiatan politik langsung dan tidak langsung, seperti mengikuti Pemilu, kampanye politik, diskusi kebijakan publik dan problematika umum, demonstrasi, boikot dan sebagainya.

Dalam kamus Wikipedia menjelaskan partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam kontek hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak

pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sementara itu, pengertian lain mengenai konsep partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50-60%). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir barat yang selalu datang dengan konsep *deliberative democracy* (Turwahyudin, 2009.wordpress.com).

Sementara itu berkaitan dengan konsep partisipasi politik Pranab Kumar Panday seorang profesor dari jurusan Administrasi Publik di Universitas Rajshahi Bangladesh dalam penelitiannya berjudul "Roots of Women Political Participation in Bangladesh", menyatakan bahwa :

In order to comprehend gender issues in governance it is crucial to look at the extend of participation of women and men in the decision making in different institutions and to identify the gender gap and inequalities in each institution. Private-public divide associated.

with women and men is one of the important factors that have affected non-participation of women in the decision-making. From the early days of the Western political theories, society has been conceived to consist of two domains: a 'public' domain: the domain of political authority and contestation, and a 'private' realm: associated with family and home. (Pranab Kumar Panday, www.bd-election.php, 2008)

Jadi agar supaya dapat mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan gender dalam pemerintahan adalah sangat krusial untuk melihat peningkatan partisipasi wanita dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di dalam institusi yang berbeda-beda dan untuk mengidentifikasi jarak yang disebabkan oleh gender dan ketidaksamaan dalam masing-masing institusi. Bagian publik umumnya diasosiasikan dengan wanita dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Dari awal teori politik barat ,masyarakat telah difahami meliputi dua domain yaitu domain publik kekuasaan politik dan domain kekuasaan pertandingan, dan dunia privat (pribadi) diasosiasikan keluarga dan rumah. (Pranab Kumar Panday, 2008)

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk melaksanakan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menerapkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

Menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, partisipasi politik adalah kegiatan warga (privat citizen) yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah.

Menurut Michel Rush dan Phillip Althoff dalam bukunya *Pengantar Sosiologi dan Politik*, partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Menurut Ramlan Subakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya (Turwahyudin 2009. Wordpress.com).

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik diatas, maka dapat menarik satu definisi partisipasi politik, yaitu keterlibatan warga Negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.

Dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, para pemberi suara, aktivitas-aktivitas partai, dan para demonstran, ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pungutan suara atau sering dikenal dengan istilah voting, entah itu memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil Negara. Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik, Michel Rush dan Philip Althoff, mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang memungkinkan sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif,
2. Mencari jabatan politik atau administratif,
3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik,
5. Menjadi anggota aktif dalam organisasi semi-politik (*quasipolitical*),
6. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,
7. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
8. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
9. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (*voting*)

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif. Dikatakan aktif, apabila orang-orang yang bersangkutan menduduki suatu jabatan tertentu, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran untuk anggota. Hal-hal ini tidak perlu dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi secara pasif. Dalam proses, orang bisa beralih dari partisipan aktif maupun partisipan pasif atau sebaliknya.

Perlu diperhatikan bahwa tanpa partisipasi politik kehidupan politik akan mengalami kemacetan. Namun pandangan tentang pentingnya

partisipasi politik berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lainnya.

Dalam masyarakat primitif dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakan dengan kegiatan yang lainnya.

Dalam masyarakat berkembang karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern serta tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf, dan masalah umum dari komunikasi partisipasi politik dibatasi oleh berbagai faktor, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin lebih tinggi dan yang lainnya mungkin lebih rendah.

Salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada setiap tingkatan.

Adalah manfaat untuk mempertimbangkan partisipasi politik dalam arti hierarki, akan tetapi harus pula diingat bahwa beberapa tingkatan mungkin tidak terdapat dalam beberapa sistem politik. Tidak semua sistem politik bentuk pemilihan, beberapa sistem sangat membatasi dan melarang rapat-rapat umum tentang demonstrasi, sedangkan yang lainnya melarang pembentukan partai politik dan tipe lain dari organisasi politik atau non-politik dan sebagainya.

Banyak ahli yang menyodorkan tingkat-tingkat partisipasi politik. Ustaman Bin Abdul Mu'iz Ruslan membedakan 3 tingkatan partisipasi politik (Prihatmoko, 2003:184) yaitu :

1. Kelompok vokalis untuk mengidentifikasi orang-orang yang mengikuti kegiatan politik dengan menggunakan lebih dari satu bentuk partisipasi politik aktif.
2. Kelompok pemikir, yakni mereka yang memberikan perhatian pada penelitian dan pergulatan dengan informasi publik.
3. Kelompok apatis, yakni untuk menyebut orang-orang yang tidak mengikuti kegiatan politik apapun.

Tidak semua orang berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam kenyataan hanya sedikit yang mau berpartisipasi politik dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk partisipasi politik atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang lebih rendah.

c. Faktor pendorong seseorang berpartisipasi

Menurut Frank Lindenfeld bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi

pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi. (Turwahyudin, 2009.wordpress.com).

Partisipasi politik merupakan urgensi karena pertumbuhan demokrasi tergantung pada sejauh mana keikutsertaan para anggota masyarakat secara aktif dalam menentukan tujuan politik. Partisipasi politik ditentukan oleh sejumlah faktor diantaranya adalah agama, jenis budaya politik, karakter lingkungan politik. Adapun faktor personal yang mempengaruhi partisipasi politik mencakup:

1. Derajat perhatiannya atau motivasi yang dimiliki dalam partisipasi politik individu.
2. Tingkat kemampuan dan kecakapan, misalnya untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan memilih dan kesadaran politik kritis.
3. Keyakinan individu dalam kemampuannya mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. (Prihatmoko, 2003:184)

Sedangkan Milbrath menyebutkan 4 faktor pendorong utama yang menyebabkan seseorang berpartisipasi politik antara lain :

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik

Karena adanya perangsang maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk partisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui massmedia atau diskusi formal.

2. Faktor karakteristik pribadi seseorang

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

3. Karakteristik sosial seseorang

Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghadapi nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi politik.

4. Keadaan politik

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

(Turwahyudin, 2009.wordpress.com)

Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam suatu usaha guna memecahkan masalahnya atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politik meningkat dengan bertambahnya pengetahuannya. Kepribadian yang sosiabel (ramah, mudah bergaul), dominan dan ekstrovert (lebih memikirkan diri orang lain) akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

Robert Lane dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa berpartisipasi politik mempunyai 4 macam fungsi :

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi,
2. Sebagai sarana kebutuhan penyesuaian sosial,
3. Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus,
4. Sebagai saran memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.

Menurut Soryarmoorthy Renjini partisipasi politik di India dari hasil penelitian yang berjudul "Political Participation of Women the Case of Women Councilors in Kerala India", menyatakan bahwa :

Although women, to a great extent, succeeded in gaining acceptance and recognition, the scenario has not yet changed dramatically. Chowdhury et al who have studied the political affairs of women in 43 countries found that in no country did women have political status, access or influence equal to that of men. Though women constitute nearly half of the global population, their participation in political affairs has not been significant. The findings of a recent study by the Inter-Parliamentary Union (1997) brings out this dimension vividly. The

study shows that the percentage of women in world parliaments has dropped over the years. Their representation is quite disproportionate to their population. Strangely enough, ten parliaments in the world do not have even a single woman parliamentarian. According to the study, while there are 33,981 men parliamentarians in the world, the number of women is only 4,512 (13.28%). Further, only 7.7 per cent of the parliamentary group leaders are women, and only nine per cent of party spokespersons belong to the fairer sex. (Soryarmoorthy Renjini, www.keralapolitical.com, 2008)

Meskipun para wanita menunjukkan keterlibatan politik hal ini berhasil dalam memperoleh penerimaan dan pengakuan, skenario yang belum berubah secara dramatis. Chowdury yang telah mempelajari masalah politik wanita di 43 negara menemukan bahwa tidak ada negara yang mempunyai status politik, akses atau pengaruh yang sama dengan kaum laki-laki. Meskipun mendekati separo dari populasi global, partisipasi mereka dalam masalah-masalah politik yang tidak signifikan. Penemuan dari sebuah studi baru-baru ini oleh Persatuan Parlemen Internasional (1997) membawa dimensi ini dengan gigih. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persentase dari wanita dalam dunia parlemen telah jatuh selama bertahun-tahun. Representasi mereka sangat tidak proporsional dengan populasi mereka. Cukup mengherankan, 10 parlemen di dunia bahkan tidak mempunyai anggota parlemen wanita satupun. Menurut studi tersebut, sementara ada 33,981 anggota parlemen laki-laki di dunia. Jumlah dari wanitanya hanya 4,512 (13,28 %). Lebih lanjut, hanya 7,7 persen dari pimpinan kelompok parlemen dan hanya 9

persen dari juru bicara yang memiliki jenis kelamin lebih fair.
(Soryarmoorthy Renjini, 2008)

d. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih para orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas Pemilu juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas walaupun ini untuk kata "pemilihan" lebih sering digunakan. Sistem Pemilu yang digunakan adalah *luber dan jurdil* (wikipedia.org).

Di dalam penjelasan Pembukaan Undang Undang (UU) No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilu dilaksanakan secara (bersifat) langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah langsung, artinya, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan kehendak dan tanpa perantara.

Bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan,

pekerjaan, dan status sosial. Pengertian bebas, mengandung makna setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Lebih dari itu, di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Bersifat rahasia mengandung makna, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui pihak manapun.

Pengertian bersifat jujur, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Penjelasan di atas sekaligus memberikan refleksi terhadap pengertian adil dalam sistem yang paling dasar penyelenggaraan Pemilu tahun 2009. Untuk dapat berlakunya sistem tersebut dalam pelaksanaannya, maka kemudian dibentuk berbagai macam perangkat, baik perangkat lunak maupun keras. Perangkat lunaknya berupa peraturan dan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu.

Perangkat keras, berupa pembentukan badan-badan atau lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat sampai kepada lembaga paling bawah, contohnya

Panitia Pemungutan Suara (PPS). Juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sampai lembaga paling bawah badan tersebut. Dengan tersedianya perangkat lunak dan keras, penyelenggaraan Pemilu 2009 diharapkan mampu mewujudkan sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut hampir yakin dapat tercapai dengan diterapkannya UU No 10 tahun 2008, yang telah banyak melakukan perubahan terhadap sistem yang berlaku dalam UU Pemilu sebelumnya, yakni UU No 12 tahun 2003 dan terakhir UU (Perubahan) No 1 tahun 2006 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam UU No 10 tahun 2008, di antaranya penguatan persyaratan peserta Pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan (Dapil), sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa Pemilu.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab. Dalam penelitian ini yang menjadi

fokus penelitian adalah pihak perempuan, sebagaimana partisipasi perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kelurahan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam pemilihan penguasa dan secara langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

3. Perempuan

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan dimana secara kodrati di bawah kaum laki-laki. Dimana dalam dunia politik di negara Indonesia perempuan dianggap makhluk nomor dua, sehingga partisipasi politik perempuan masih rendah.

4. Pemilu

Yakni memilih wakil rakyat yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya dalam kursi pemerintahan, yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanda ada suatu paksaan dari pihak manapun.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas yakni bagaimana partisipasi politik perempuan di kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam PEMILU (Pemilihan

Umum). Oleh karena itu bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bentuk penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif yang penuh nuansa dan lebih berharga dari sekedar pernyataan jumlah maupun frekuensi dalam bentuk angka tanpa berusaha melakukan hipotesa. yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi seperangkat kriteria untuk memberikan keabsahan dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dengan subyek yang diteliti (Moleong 2001:4-6).

Bentuk penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif yang penuh nuansa, yang lebih berharga sekedar pernyataan jumlah maupun frekuensi dalam bentuk angka tanpa berusaha melakukan hipotesa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Adapun alasan pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah :

- Lokasi penelitian letaknya terjangkau oleh kemampuan peneliti.
- Di kelurahan ini telah mendukung dan melaksanakan Pemilu dan di dukung oleh komponen masyarakat.

- Adanya kemudahan untuk mendapatkan data informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

3. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui interview, dimana dalam penelitian ini data diperoleh dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Jatipurno. Data primer ini di ambil dari beberapa interview atau wawancara antara lain dengan warga masyarakat khususnya pihak perempuan yakni organisasi perempuan, tokoh perempuan yang ada dalam masyarakat dan kaum perempuan yang telah ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif yang telah berlangsung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan *Dokumentasi* yaitu proses pengambilan data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan Jatipurno untuk mendukung berlangsungnya penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat dilakukan suatu penelitian diperlukan data yang cukup lengkap yang didapat dari teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Guna mengamati seluruh kegiatan dan peristiwa yang terjadi dilokasi penelitian serta mengadakan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian maka peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian, dimana pelaksanaannya langsung ke tempat kejadian. Cara observasi, penulis melakukan dalam dua cara yaitu observasi tak berperan dan observasi berperan. Observasi tak berperan adalah pengamatan dimana ketika peneliti mengadakan observasi tidak diketahui oleh subyek. Pengamatan berperan yaitu pengamatan yang diketahui oleh subyek dan subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati semua tingkah laku mereka. Dalam penelitian ini menggunakan observasi berperan pasif. Peneliti hanya mendatangi lokasi tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif (Sutopo,2002;65-66).

b. Wawancara mendalam (in-depth interviewing)

Wawancara ini dilakukan dengan struktur yang ketat, namun dengan pertanyaan yang semakin memfokus sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang bersangkutan dengan perasaan, sikap, pandangan dan perbuatan mereka. Wawancara atau interview sebagai teknik pengumpulan data mempunyai fungsi sangat banyak antara lain

sebagai pengumpul data keterangan, menguji kebenaran informasi meminta pendapat dari berbagai pihak yang dipakai sebagai sumber informasi seperti yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, bahwa:

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. (Moleong, 2001: 135)

Dengan wawancara, peneliti dapat menggali informasi mengenai data secara mendalam yang disebut *indepth interview* (Sutopo 2002 59). Teknik wawancara mendalam ini dilakukan dengan struktur yang tidak ketat dan semi formal agar keterangan yang diperoleh dari informan mempunyai kedalaman dan keleluasaan sehingga mampu memperoleh informasi yang sebenarnya dan sedetail-detailnya. Wawancara mendalam ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang mendalam dan dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah yang dijelajahnya. Dalam proses wawancara ini selain panca indera juga digunakan alat perekam atau tape recorder.

c. Dokumen

Adalah pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dokumen, laporan pelaksanaan Pemilu dan sebagainya. Yang akan di dokumentasikan semua data dan hasil penelitian

yang diperoleh oleh penulis selama penelitian di Kelurahan Jatipurno berlangsung.

d. Interview Guide

Interview guide merupakan teknik pengumpulan data dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis, yang berfungsi sebagai interview guide. Dalam penelitian ini *interview guide* bersifat fleksibel, artinya pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat berkembang dan tidak terpaku pada daftar pertanyaan. Hal ini karena, pada penelitian kualitatif semakin banyak informasi yang diperoleh maka akan semakin valid data yang diperoleh dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel :

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan unsur-unsur survei yang memiliki spesifikasi tertentu (SIamet, 2001:2). Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan partisipasi politik khususnya perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri

b. Sampel

Sampel merupakan subset atau bagian dari populasi. Sampel harus dipandang sebagai perkiraan dari keseluruhan dan bukan keseluruhan itu sendiri. Tentang siapa dan berapa jumlah sampel sangat tergantung dari

informasi yang diperlukan (Slamet, 2001:5). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil tidak mutlak jumlahnya, artinya sampel yang akan diambil disesuaikan dengan kebutuhan data selama di lapangan. Dalam penelitian kualitatif sampel bukan mewakili populasi, akan tetapi sampel berfungsi untuk menjangkau informasi dari berbagai sumber dan bangunannya. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan pada diri, pada adanya perbedaan-perbedaan nantinya dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul (Moleong,2001:165).

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample* (sampel bertujuan). *Purposive sample* adalah dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjukkan informasi lain yang lebih tahu, maka pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Sutopo, 2002:56). Strategi ini dimaksudkan untuk dapat menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari studi informasi yang silang-menyilang dari berbagai tipe informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

warga masyarakat kelurahan Jatipurno khususnya pihak perempuan yang telah ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu.

6. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif validitas data sering diragukan. Untuk dapat meningkatkan validitas data yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti menggunakan review informan. Review informan merupakan salah satu cara yang penting pada akhir wawancara juga pada saat penelitian berlangsung. Peneliti mengulangi dalam garis besarnya apa yang telah dikatakan oleh informan dengan maksud agar dapat memperbaiki bila ada kekeliruan atau menambah apa yang masih kurang. Atau peneliti memeriksa hasil wawancara untuk mendapatkan pengertian yang tepat, atau melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin ada untuk lebih dimantapkan (Sutopo,2002:83)

Untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh selama proses penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2001:178)

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

(Moleong, 2001)

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Pada bagian ini memerlukan pekerjaan yang sistematis dan komunikatif, komprehensif dalam merangkai data responden, mengorganisasi data, menyusun data dan merakitnya ke dalam satu kesatuan yang logis, sehingga jelas kaitannya.

Untuk menganalisa data, digunakan model analisis interaktif (*Interactive Model Analisis*). Menurut H B Sutopo bahwa dalam proses analisis data ada tiga komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti. Tiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo, 2002:91-93).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada di dalam *field note* (catatan lapangan). Proses ini terus berlangsung selama pelaksanaan penelitian dan dimulainya proses penelitian, bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, sampai laporan penelitian diselesaikan. Reduksi data merupakan laporan sebagian dari proses analisis yang mempertegas, memusatkan data dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

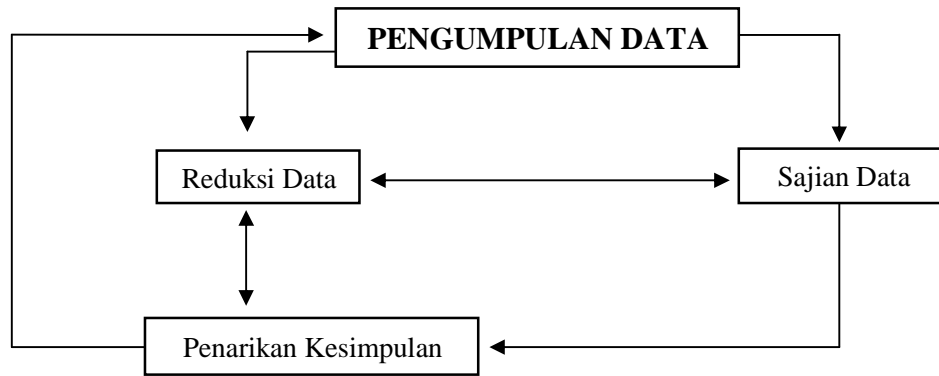
b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematikanya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis (reduksi data dan sajian data). Ketiga proses analisa data tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan dan berhubungan erat, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1
Model Analisis Interaktif



(Sutopo, 2002 : 96)

Dari model analisis tersebut, menunjukkan bahwa pengumpulan data dibuat reduksi data dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dapat dipahami secara mendalam kemudian disusun secara sistematis. Bila pengumpulan data sudah berakhir, maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang didapat dalam reduksi data dan sajian data.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. KEADAAN GEOGRAFIS

1. Lokasi Daerah Penelitian

Kelurahan Jatipurno memiliki luas 199.700 ha/m² dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1598 orang dan perempuan sebanyak 1511 orang. Jarak antara Kelurahan Jatipurno dengan Kabupaten Wonogiri yakni 35 km di bagian Timur dari Kabupaten tersebut. Iklim di Kelurahan dalam suhu rata-rata harian 25-30° C terletak dari permukaan laut 560 md. Sebagian besar wilayah Jatipurno yakni daerah pegunungan dengan permukaan tanah yang tidak rata, sehingga pemukiman rumah warga yang tidak teratur. Suhu di daerah Jatipurno termasuk dingin sehingga sangat cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi dan coklat. Potensi tanaman pangan di Kelurahan Jatipurno yakni jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, padi sawah, ubi kayu, bawang merah dan sawi. Sebagian besar masyarakat Jatipurno mata pencahariannya adalah bertani sehingga bercocok tanam adalah sebagai penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu juga menghasilkan tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, pisang dan juga penghasil tanaman apotik hidup. Masyarakat juga mengembangkan peternakan sebagai usaha sampingan untuk membantu

perekonomian, adapun hewan yang ditenak antara lain sapi, kerbau, ayam kampung, bebek, kambing, kelinci.

Kelurahan Jatipurno dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Bapak Wardi. Kelurahan Jatipurno ini memiliki beberapa dusun yakni dusun Kuryo, Kedung Rejo, Panggil dan Pule.

Adapun jumlah Kepala Keluarga dari setiap dusun adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Kuryo : terdiri dari 347 kepala keluarga
- b. Dusun Kedung rejo : terdiri dari 203 kepala keluarga
- c. Dusun Panggil : terdiri dari 905 kepala keluarga
- d. Dusun Pule : terdiri dari 201 kepala keluarga

2. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Kelurahan Jatipurno adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kelurahan Jatipurno

Batas	Desa Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Bale Panjang	Jatipurno
Sebelah Selatan	Jatisrono	Jatisrono
Sebelah Timur	Tawang Rejo	Slogohimo
Sebelah Barat	Jeporo Kopen	Girimarto

Sumber : Monografi Kecamatan Jatipurno 2008.

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Jatipurno adalah 199.700 Ha dimana wilayah tersebut terbagi ke dalam wilayah pemukiman, industri, pekarangan dan fasilitas umum lainnya. Adapun tata guna lahan di Kelurahan Jatipurno dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tata Guna Lahan di Kelurahan Jatipurno

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Prosen (%)
1	Luas Pemukiman	39.000	19,52
2	Luas Persawahan	87.700	43,91
3	Luas Perkebunan	-	-
4	Luas Pemakaman	3.000	1,50
5	Luas Pekarangan	50.000	25,03
6	Luas Taman	-	-
7	Perkantoran	6.000	3,00
8	Luas Prasarana Umum	14.000	7,01
	Luas	199.700	100

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kelurahan Jatipurno seluas 87.700 Ha atau 43,91 dipergunakan untuk persawahan, sedangkan 3.000 Ha atau 1,50 dipergunakan untuk pemakaman.

Hal ini menandakan bahwa Kelurahan Jatipurno merupakan wilayah Kelurahan yang memiliki lahan persawahan yang luas.

B. KEADAAN PENDUDUK

1. Jumlah Penduduk

Dilihat dari modal dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi kelancaran pembangunan sebuah masyarakat desa/kelurahan. Pertambahan penduduk disatu pihak sebagai tambahan bagi suplai tenaga kerja berhadapan dengan terbatasnya tanah dan kesempatan kerja disektor pertanian telah menyebabkan meningkatnya tekanan tenaga kerja atas tanah dan menimbulkan permasalahan dalam hal fenomena ketenagakerjaan dan pendapatan penduduk di Kelurahan Jatipurno.

Menurut data Monografi Kelurahan Jatipurno 2008, jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Jatipurno adalah 3109 jiwa yang terdiri dari 1598 jiwa laki-laki dan 1511 jiwa perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini dapat dipergunakan untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif, non produktif dan belum produktif. Selain itu juga dapat menjadi petunjuk bagi kemungkinan perkembangan penduduk dimasa yang akan datang. Komposisi

penduduk Kelurahan Jatipurno menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	120	142	262
5-9	178	113	291
10-14	133	137	270
15-19	75	51	126
20-24	203	203	406
25-29	123	131	254
30-39	250	258	508
40-49	244	255	499
50-58	227	232	459
Jumlah	1.553	1.522	3.109

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar adalah jumlah penduduk usia produktif (15-49 tahun), yaitu sebanyak 1.793 jiwa, disusul penduduk belum produktif (0-14 tahun) yang berjumlah 822 jiwa dan penduduk non produktif (50-58 tahun) sebanyak 459 jiwa. Pada kelompok penduduk usia produktif yang terbesar adalah penduduk kelompok usia 30-39 tahun, yaitu sebanyak 508 jiwa dan untuk kelompok belum

produktif jumlah terbesar adalah penduduk kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 291 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kelurahan Jatipurno lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu berjumlah 1.553 jiwa. Selain itu dapat diketahui perbedaan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki (sex ratio) yaitu sebesar 31 jiwa.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Untuk mengetahui keadaan penduduk Kelurahan Jatipurno menurut mata pencahariannya dapat kita perhatikan dari tabel berikut :

Tabel 2.4
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosen (%)
1	Pengusaha	47	6,07
2	Buruh Industri	30	3,87
3	Pembantu rumah tangga	22	2,84
4	Pedagang	14	1,80
5	Pengangkutan	5	0,64
6	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	59	7,62
7	Pensiunan	47	6,07
8	Petani	540	69,76
9	Lain-lain	10	1,29
	Jumlah	774	100

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kelurahan Jatipurno dapat dikatakan heterogen, karena penduduk Kelurahan Jatipurno tidak hanya terpaku pada satu mata pencaharian saja. Hanya saja petani merupakan satu jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Jatipurno yang utama, disamping itu ada beberapa jenis mata pencaharian lain seperti di bidang pengusaha, pedagang, pegawai negeri dan sebagainya.

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Distribusi penduduk Kelurahan Jatipurno menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kedadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
(Bagi Umur 4 tahun keatas)

No	Tingkat Pendidika	Jumlah	Prosen (%)
1	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	47	1,38
2	Tamat SLTA	510	15,02
3	Tamat SLTP	792	23,32
4	Tamat SD	906	26,68
5	Tidak Tamat SD	459	13,51
6	Sedang Sekolah	681	20,05
	Jumlah	3.395	100

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Jatipurno tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah lulusan Akademi atau Perguruan Tinggi yang berjumlah 47 orang dan lulusan SLTA sebanyak 510 orang. Hal ini memberikan suatu indikasi yang positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Jatipurno.

5. Penduduk Menurut Agama

Heterogenitas penduduk Kelurahan Jatipurno juga terdapat pada agama yang mereka anut. Adapun keadaan penduduk menurut agama dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Keadaan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Prosen (%)
1	Islam	3.091	99,42
2	Kristen	15	0,48
3	Katolik	3	0,09
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	3.109	100

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang memeluk agama Islam merupakan jumlah mayoritas terbesar di Kelurahan Jatipurno yaitu sejumlah 3.091 orang, disusul dengan pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 15 orang dan pemeluk agama Katolik hanya 3 orang saja.

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Sosial Budaya

a. Jumlah Sarana Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang ada dalam satu daerah dapat dijadikan salah satu tolok ukur kemajuan daerah tersebut. Oleh karena itu, sarana pendidikan tersebut tentunya merupakan tuntutan kebutuhan warganya. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Jatipurno dapat kita lihat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Pendidikan Umum	Gedung
1	Kelompok Bermain	-
2	TK	2
3	SD	2
4	SLTP	2
5	SLTA	1

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008

Untuk sarana pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA jumlah tersebut sudah cukup memadai bagi masyarakat Kelurahan Jatipurno. Namun untuk sarana pendidikan Akademi/Perguruan Tinggi Kelurahan Jatipurno tidak memilikinya. Sehingga bagi masyarakat yang ingin

melanjutkan pendidikan ke Akademi/Perguruan Tinggi maka harus ke pusat kota.

b. Jumlah Sarana Tempat Ibadah

Jumlah sarana peribadatan yang ada dalam suatu daerah dapat dijadikan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan budi pekerti/ spiritual pada daerah tersebut. Oleh karena itu sarana peribadatan tersebut tentunya merupakan tuntutan kebutuhan warganya. Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Jatipurno dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushola	6
3	Gereja	2
4	Wihara	-

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Seperti telah diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Jatipurno yang memeluk agama Islam merupakan jumlah pemeluk yang terbesar di Kelurahan tersebut. Untuk itu sarana peribadatan yang berupa masjid dan mushola jumlahnya cukup banyak. Hal ini dimungkinkan untuk menampung jamaah yang jumlahnya cukup besar tersebut.

Sedangkan tempat peribadatan lain seperti gereja, wihara jumlahnya sedikit, hal ini sesuai dengan banyaknya pemeluk agama tersebut.

c. Jumlah Sarana Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan yang ada dalam suatu daerah dapat dijadikan salah satu tolok ukur kemajuan sarana kesehatan pada daerah tersebut. Oleh karena itu sarana kesehatan tersebut tentunya merupakan tuntutan kebutuhan warganya. Untuk mengetahui jumlah sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Jatipurno dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Sarana Kesehatan

No	Tempat Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Apotik	1
3	Posyandu	4
4	Praktek Dokter	2
5	Rumah Bersalin	1
6	Bidan dan Perawat	4

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Jatipurno sudah terdapat fasilitas kesehatan yang cukup banyak dan memadai sehingga dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mengalami suatu kendala ataupun masalah. Fasilitas kesehatan tersebut adalah

Puskesmas dengan jumlah 1, Apotik dengan jumlah 1, Posyandu dengan jumlah 4, Praktek Dokter dengan jumlah 2 orang, Rumah Bersalin dengan jumlah 1, Bidan dan Perawat dengan jumlah 4 orang.

d. Jumlah Organisasi Sosial

Tabel 2.10
Jumlah Organisasi Sosial

No	Organisasi Sosial	Jumlah Pengurus
1	Karang Taruna	24
2	Gotong Royong	15
3	Kelompok Tani	25

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tidak banyak organisasi sosial yang ada di Kelurahan Jatipurno. Organisasi yang ada hanya karang taruna dengan jumlah pengurus 24 orang, Gotong royong dengan pengurus 15 orang dan kelompok tani dengan jumlah pengurus sebanyak 25 orang.

2. Sarana Perhubungan :

Tabel 2.11
Jumlah Sarana Perhubungan

No	Sarana Perhubungan	Jumlah
1	Jalan	8
2	Jembatan	6

Sumber : Monografi Kelurahan Jatipurno 2008.

Untuk sarana perhubungan yang ada di Kelurahan Jatipurno terdiri dari dua jenis yakni jalan dan jembatan. Secara umum kondisi jalan dan jembatan yang ada di Kelurahan Jatipurno dikatakan baik sehingga memperlancar mobilitas serta interaksi masyarakat.

Adapun data dan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni mengenai Partisipasi Politik perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009

NO	TPS	TEMPAT
1	1	Dusun Kuryo RT 01/01
2	2	Dusun Kuryo RT 05/01
3	3	Dusun Kedung Rejo RT 01/02
4	4	Dusun Kedung Rejo RT 02/02
5	5	Dusun Pule RT 02/03
6	6	Dusun Pule RT 03/01

7	7	Dusun Panggil RT 01/04
8	8	Dusun Panggil RT 02/04

Sumber : KPU Kabupaten Wonogiri 2009.

Adapun mengenai jumlah pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- a. Laki-laki : 1.282 orang
- b. Perempuan : 1.209 orang
- c. Jumlah total : 2.491 orang

Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam KPPS sudah cukup baik. Dari kedelapan TPS, perempuan berpartisipasi di empat TPS yakni Ibu Sarminah Catharina sebagai anggota di TPS 1. Ibu Sri Wahyuni sebagai ketua KPPS di TPS 3, Ibu Dwi Hariyani menjadi anggota KPPS 4 dan Ibu Karyatni menjadi anggota KPPS 3. Kemudian dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) perempuan yang ikut ambil bagian yakni Ibu Setyaningsih Ariani sebagai anggota PPS dan Ibu Seh Winarni sebagai pelaksana sekretariat yang memegang keuangan di PPS. Dalam Partai Politik perempuan juga ikut berpartisipasi, yakni Ibu Sukini sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai Saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian beserta dengan pembahasannya.

1. Profil Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dihadapi dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang tahu dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti baik lisan maupun tertulis, guna mengetahui partisipasi politik perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 secara lebih jelas. Adapun profil dari delapan informan yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut :

a. Ibu Setyaningsih Ariani

Ibu Setyaningsih Ariani merupakan informan pertama yang telah diwawancarai, ia berusia 30 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana dan berkedudukan sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Selain itu ibu Setyaningsih Ariani berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Ibu Seh Winarni

Ibu Seh Winarni merupakan informan kedua yang telah diwawancarai, ia berusia 55 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah SLTP dan berkedudukan sebagai pelaksana sekretariat dalam PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Ibu Seh Winarni berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan Jatipurno.

c. Ibu Sri Wahyuni

Ibu Sri Wahyuni merupakan informan ketiga yang telah diwawancarai, ia berumur 42 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana dan ia berkedudukan sebagai ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Selain itu ibu Sri Wahyuni berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni seorang guru di SD Kelurahan Jatipurno.

d. Ibu Dwi Hariyani

Ibu Dwi Hariyani merupakan informan keempat yang diwawancarai, ia berusia 31 tahun. Ibu Dwi Hariyani berkedudukan sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno.

Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana dan berprofesi sebagai peternak sapi.

e. Ibu Karyatni

Ibu Karyatni merupakan informan kelima yang telah diwawancarai, ia berusia 40 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah SLTA dan berkedudukan sebagai anggota kelompok KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Ibu Karyatni berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai usaha toko kelontong di rumahnya.

f. Ibu Sarminah Catharina

Ibu Sarminah merupakan informan keenam yang telah diwawancarai, ia berusia 50 tahun. Ia dalam Pemilu Legislatif berpartisipasi sebagai pemilih dan sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) data Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana dan berprofesi sebagai guru SD di Kelurahan Jatipurno.

g. Ibu Sukini

Ibu Sukini merupakan informan ketujuh yang diwawancarai. Ibu Sukini berusia 35 tahun. Ia adalah warga pemilih dusun Kuryo Rt:01/01 Kelurahan Jatipurno, serta berkedudukan sebagai Saksi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno.

Pendidikan terakhirnya adalah SLTP dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

h. Ibu Suparti

Ibu Suparti merupakan informan kedelapan yang diwawancarai. Ibu Suparti berusia 38 tahun. Ia adalah warga pemilih dan sebagai saksi dalam proses pemungutan suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Ia beralamat di dusun Kuryo Rt:02/01. Pendidikan terakhirnya adalah SLTP dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Sementara itu untuk memperoleh validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber (informan) lain yaitu tiga informan antara lain :

a. Bapak Wardi

Bapak Wardi adalah informan yang diwawancarai penulis, ia berusia 50 tahun. Ia adalah Kepala Kelurahan Jatipurno.

b. Bapak Suroyo

Bapak Suroyo adalah informan yang diwawancarai oleh penulis, ia berusia 40 tahun. Ia berkedudukan sebagai Kepala lingkungan dusun Kuryo Kelurahan Jatipurno.

c. Bapak Kadimo

Bapak Kadimo adalah informan berikutnya yang diwawancarai oleh penulis. Ia berusia 45 tahun warga beralamat di dusun Kuryo

RT:03/01 Kelurahan Jatipurno, serta berkedudukan sebagai anggota Partai Politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

Berikut ini adalah matriks dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis :

Matriks 3.1

Profil Informan

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN
1	Ibu Setyaningsih Ariani	30	Sarjana	Anggota PPS
2	Ibu Seh Winarni	55	SLTP	Sekretariat PPS
3	Ibu Sri Wahyuni	42	Sarjana	Ketua KPPS
4	Ibu Dwi Hariyani	31	Sarjana	Anggota KPPS
5	Ibu Karyatni	40	SLTA	Anggota KPPS
6	Ibu Sarminah Catharina	50	Sarjana	Anggota KPPS
7	Ibu Sukini	35	SLTP	Warga Pemilih
8	Ibu Suparti	38	SLTP	Warga Pemilih
9	Bapak Wardi	50	SLTA	Kepala Kelurahan
10	Bapak Suroyo	40	SLTA	Kepala Lingkungan
11	Bapak Kadimo	45	SLTA	Warga

Sumber : Data Primer diolah, Juli 2009

2. Latar Belakang Perempuan Berpartisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

Salah satu syarat utama dari tegak dan berjalannya demokrasi adalah adanya partisipasi politik. Definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, sosialisasi Pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dan seterusnya.

Dalam dunia politik antara perempuan dan laki-laki tidak berimbang, artinya peran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki persentasenya sangat memperhatikan. Jika kita berbicara partisipasi politik perempuan, maka yang terjadi adalah adanya representasi perempuan yang rendah didalamnya. Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun keterlibatan perempuan di dalam proses

pemungutan suara baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Dengan adanya produk perundang-undangan mengenai peluang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam ranah politik, kaum perempuan bisa ikut andil untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/keputusan dan partisipasi dalam Pemilu.

Dalam kaitannya dengan masalah yang dikaji yakni mengenai partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, terdapat berbagai partisipasi perempuan dalam proses pesta demokrasi yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak politik untuk meningkatkan peran gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa perempuan di Kelurahan Jatipurno juga berantusias dalam berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009.

Realitas sosial ini menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik maka diharapkan kebijakan publik dan kehidupan politik bagi perempuan menjadi lebih baik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ketua KPPS 3 Kelurahan Jatipurno, Ibu Sri Wahyuni :

“...Saya ikut berpartisipasi, karena saya sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berpolitik yakni hak pilih untuk menentukan nasib dan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Saat ini kaum perempuan bisa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan dalam Pemilu, seperti saat ini saya dipercaya oleh KPU untuk terlibat menjadi panitia Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Jatipurno...”

Sedangkan menurut Ibu Setyaningsih Ariani selaku anggota Panitia Pemungutan Suara mengatakan :

“.....Karena secara intern kita adalah warga negara yang punya hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri dan bangsa Indonesia secara umum dan untuk itu dengan memilih wakil-wakil rakyat maka akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga dalam wujud partisipasi saya ini bisa meningkatkan peran gender dalam dunia politik...”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Dwi Hariyani, ia menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan :

“...Ikut berpartisipasi dalam Pemilu yakni mencerminkan masyarakat yang cerdas, karena Pemilu itu program pemerintah yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali yang merupakan ajang pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Sehingga menurut saya berpartisipasi dalam Pemilu sangat penting dan bermanfaat bagi saya untuk menyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani demi negara...”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sarminah Catharina. ia selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menuturkan :

“...Karena sebagai warga yang baik apabila negara mengadakan pesta demokrasi yakni Pemilu maka kita harus ikut berpartisipasi untuk menentukan tujuan bangsa. Karena tiap warga masyarakat itu memiliki hak politik jadi apabila tidak dipergunakan maka kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan untuk kemajuan bangsa...”.

Sedangkan menurut Ibu Karyatni adalah :

“....Saya ikut berpartisipasi, karena saya sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berpolitik yakni hak pilih untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi pemerintahan untuk menjalankan roda perekonomian 5 tahun mendatang...”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Seh Winarni :

“....Berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 merupakan hal yang sangat penting mas bagi saya, selain menggunakan hak pilih juga bermanfaat untuk kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa...”

Ibu Sukini selaku warga pemilih dan Saksi juga menuturkan :

“...Sebagai pemilih dan warga negara yang taat kepada pemerintah maka hendaknya menggunakan hak pilih untuk menentukan nasib bangsa...”

Ibu Suparti ikut menambahkan :

“....Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ini saya ikut berpartisipasi politik agar berjalan secara lancar, sehingga menghasilkan para anggota Legislatif yang memikirkan kepentingan rakyat...”

Dari penuturan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang perempuan di Kelurahan Jatipurno ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah karena adanya keinginan dari kaum perempuan untuk berikut serta dalam dunia politik. Menurutnya yang mempunyai hak politik bukan hanya kaum laki-laki semata, namun kaum perempuan juga mempunyai hak berpolitik dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Setyaningsih Ariani dan Ibu

Dwi Hariyani yang mengatakan bahwa sebagai warga negara itu mempunyai hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri khususnya kaum perempuan dan bagi bangsa Indonesia. Selain itu dengan memilih wakil-wakil rakyat maka akan sangat menentukan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun ke depan dan partisipasi perempuan dalam politik untuk menyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani untuk meningkatkan peran gender di Kelurahan Jatipurno.

Partisipasi perempuan dalam politik begitu penting karena tidak ada demokrasi yang sejati dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya kesetaraan partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan dan tingkat pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui informasi mengenai latar belakang perempuan ikut berpartisipasi politik di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Berikut ini matriks yang memaparkan mengenai latar belakang perempuan ikut berpartisipasi politik di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 :

Matriks 3.2

Latar Belakang Partisipasi Politik Perempuan

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009

No	Nama	Alasan
1	Ibu Sri Wahyuni	Sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berpolitik yakni hak pilih untuk menentukan nasib dan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Saat ini kaum perempuan bisa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan dalam Pemilu, seperti saat ini saya dipercaya oleh KPU untuk terlibat menjadi panitia Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Jatipurno.
2	Ibu Setyaningsih Ariani	Secara intern adalah warga negara yang punya hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri dan bangsa Indonesia secara umum dan untuk itu dengan memilih wakil-wakil rakyat maka akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga dalam wujud partisipasi ini bisa meningkatkan peran gender dalam dunia politik.
3	Ibu Dwi Hariyani	Ikut berpartisipasi dalam Pemilu yakni mencerminkan masyarakat yang cerdas, karena Pemilu itu program pemerintah yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali yang merupakan ajang pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Sehingga berpartisipasi dalam Pemilu sangat penting dan bermanfaat untuk menyalurkan aspirasi politik yang tergerak dari hati nurani demi negara.
4	Ibu Sarminah Catharina	Sebagai warga yang baik apabila negara mengadakan pesta demokrasi yakni Pemilu maka kita harus ikut berpartisipasi untuk menentukan tujuan bangsa. Karena tiap warga masyarakat itu memiliki hak politik jadi apabila tidak dipergunakan maka kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan untuk kemajuan bangsa.
5	Ibu Karyatni	Ikut berpartisipasi, karena sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berpolitik yakni hak pilih untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi pemerintahan untuk menjalankan roda perekonomian 5 tahun mendatang.
6	Ibu Seh Winarni	Berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 merupakan hal yang sangat penting mas bagi saya, selain

		menggunakan hak pilih juga bermanfaat untuk kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa.
7	Ibu Sukini	Sebagai pemilih dan warga negara yang taat kepada pemerintah maka hendaknya menggunakan hak pilih untuk menentukan nasib bangsa
8	Ibu Suparti	Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ini saya ikut berpartisipasi politik agar berjalan secara lancar, sehingga menghasilkan para anggota Legislatif yang memikirkan kepentingan rakyat.

Sumber : Data Primer diolah, Juli 2009

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam berpartisipasi Politik.

Menurut Frank Lindenfeld bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Peranan perempuan dalam politik harus perlu terus ditingkatkan, mengingat secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan kaum pria. Partisipasi politik merupakan urgensi karena pertumbuhan demokrasi tergantung pada sejauh mana keikutsertaan para anggota masyarakat khususnya perempuan yang secara aktif dalam menentukan tujuan politik. Partisipasi politik ditentukan oleh sejumlah

faktor diantaranya adalah agama, jenis budaya politik dan karakter lingkungan politik.

Hal ini seperti dikemukakan oleh anggota sekretariat PPS di Kelurahan Jatipurno, Ibu Seh Winarni :

“.....Saya ikut berpartisipasi dari segi internal yakni bahwa sebagai warga negara yakni mempunyai hak untuk berpartisipasi politik, wujud dari partisipasi saya berupa memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Saya ikut berpartisipasi atas dasar dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari segi eksternal saya ikut berpartisipasi dalam anggota pelaksana sekretariat PPS atas dasar penunjukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri dari usulan pihak Kelurahan Jatipurno...”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“...Karena sebagai warga negara yang baik harus menggunakan hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan. Dari segi eksternal saya berpartisipasi dalam anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas dasar penunjukan dari pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS)...”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Setyaningsih Ariani :

“...Karena secara internal saya mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan keinginan hati nurani tanpa paksaan dari pihak manapun untuk kepentingan bangsa dan diri sendiri. Sedangkan dari segi eksternal selain menggunakan hak pilih saya juga menjadi anggota KPPS atas dasar penunjukan dari Panitia Pemungutan Suara...”

Sedangkan menurut Ibu Suparti sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif mengatakan :

“.....Saya berpartisipasi karena saya harus menggunakan hak pilih saya untuk memilih calon anggota DPRD sampai DPR pusat, saya berkeinginan agar kaum perempuan bisa terwakili dikursi DPR

agar meningkatkan peran gender dan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan... ”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Karyatni selaku anggota

KPPS 3 di Kelurahan Jatipurno :

“...Dalam Pemilu Legislatif yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali, saya ingin memanfaatkan hak politik saya untuk memilih calon anggota Legislatif yang cocok dengan pandangan saya. Dari faktor eksternal saya berpartisipasi atas dasar penunjukan dari pihak aparat Kelurahan Jatipurno untuk menjadi anggota kepengurusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)... ”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Dwi Hariyani selaku

anggota KPPS di Kelurahan Jatipurno :

“...Berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 sangatlah penting untuk memilih para pemimpin yang akan duduk di pemerintahan, bagi saya memilih calon anggota legislatif tergerak dari diri sendiri. Dan saya ketika berpartisipasi dalam anggota KPPS atas penunjukan dari pihak PPS... ”.

Ibu Sarminah Catharina juga mengungkapkan :

“...Dari segi Internal saya memilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 tergerak dari hati nurani sendiri mas tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian dari segi eksternal saya ditunjuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menjadi anggota KPPS... ”.

Ibu Sukini juga mengatakan :

“...Dari segi Internal saya memilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 tergerak dari hati nurani sendiri mas tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian dari segi eksternal saya menjadi Saksi dalam proses pemungutan suara karena disuruh oleh pengurus Partai Politik yang saya ikuti... ”.

Dari pernyataan dan kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perempuan ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Dari faktor internal antara lain :

- a. Adanya partisipasi yang tinggi untuk memilih para calon anggota Legislatif yang muncul dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Adanya kesadaran yang tinggi bahwa warga negara yang baik itu harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di pemerintahan.
- c. Adanya tujuan dari wujud berpartisipasi yakni berupa memilih para calon wakil rakyat yang akan duduk dikursi pemerintahan serta berkeinginan agar kaum perempuan bisa mendapatkan kursi di DPR, sehingga bisa menyalurkan aspirasi kaum perempuan.

Sedangkan faktor eksternal adalah :

- a. Adanya penunjukan dari pihak pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada anggota masyarakat Kelurahan Jatipurno untuk menjadi panitia kepengurusan dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung, misalnya dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- b. Adanya pengaruh dari luar atau individu lain untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif.

Berikut ini matriks yang memaparkan mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno :

Matriks 3.3

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan Di Kelurahan Jatipurno Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009

No	Nama	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Ibu Seh Winarni	Sebagai warga negara yakni mempunyai hak untuk berpartisipasi politik, wujud dari partisipasi saya berupa memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan dan berpartisipasi atas dasar dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.	Berpartisipasi dalam anggota pelaksana sekretariat PPS atas dasar penunjukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri dari usulan pihak Kelurahan Jatipurno.
2	Sri Wahyuni	Karena sebagai warga negara yang baik harus menggunakan hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan.	Berpartisipasi dalam anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas dasar penunjukan dari pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS).
3	Setyaningsih Ariani	Karena secara internal mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyat sesuai dengan keinginan hati nurani tanpa paksaan dari pihak manapun untuk kepentingan bangsa dan diri sendiri.	Selain menggunakan hak pilih juga menjadi anggota PPS atas dasar penunjukan dari KPU.
4	Suparti	Berpartisipasi karena harus menggunakan hak pilih	

		untuk memilih calon anggota DPRD sampai DPR pusat, saya berkeinginan agar kaum perempuan bisa terwakili dikursi DPR agar meningkatkan peran gender dan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan.	
5	Karyatni	Dalam Pemilu Legislatif yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali, ingin memanfaatkan hak politik untuk memilih calon anggota Legislatif yang cocok dengan pandangan saya.	Berpartisipasi atas dasar penunjukan dari pihak aparat Kelurahan Jatipurno untuk menjadi anggota kepengurusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
6	Dwi Hariyani	Berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 sangatlah penting untuk memilih para pemimpin yang akan duduk di pemerintahan, bagi memilih calon anggota legislatif bergerak dari diri sendiri.	Ketika berpartisipasi dalam anggota KPPS atas penunjukan dari pihak PPS.
7	Sarminah Catharina	Dari segi Internal memilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 bergerak dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.	Kemudian dari segi eksternal ditunjuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menjadi anggota KPPS.
8	Sukini	Dari segi Internal memilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 bergerak dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.	Kemudian dari segi eksternal menjadi Saksi dalam proses pemungutan suara karena disuruh oleh pengurus Partai Politik yang di ikuti.

Sumber : Data Primer diolah, Juli 2009

4. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah penghitungan suara atau sering dikenal dengan istilah *voting*, entah itu memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil Negara. Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik, Michel Rush dan Philip Althoff, mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang memungkinkan sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif,
2. Mencari jabatan politik atau administratif,
3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik,
5. Menjadi anggota aktif dalam organisasi semi-politik (*quasipolitical*),
6. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,
7. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
8. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
9. Menjadi partisipan dalam penghitungan suara (*voting*)

Perlu diperhatikan bahwa tanpa partisipasi politik kehidupan politik akan mengalami kemacetan. Namun pandangan tentang pentingnya partisipasi politik berbeda dari sistem politik yang satu ke sistem politik yang lainnya. Dalam masyarakat primitif dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakan dengan kegiatan yang lainnya. Dalam masyarakat berkembang karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern serta tradisional, partisipasi mungkin

dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf, dan masalah umum dari komunikasi partisipasi politik dibatasi oleh berbagai faktor, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin lebih tinggi dan yang lainnya mungkin lebih rendah.

Dalam kaitannya dengan masalah yang diangkat mengenai partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, ada berbagai macam bentuk partisipasi yakni :

4.1 Partisipasi politik perempuan sebagai pemilih di Pemilu Legislatif 2009.

Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image“ yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah wanita yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan “Lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah : sementara wanita bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme; sikap dan peran wanita khususnya, pandangannya tentang

dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 ini banyak kaum perempuan yang ikut berpartisipasi politik baik sebagai pemilih, sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai saksi dalam pemungutan suara dan sebagai Caleg.

Sesuai dengan masalah yang dikaji yakni Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno antara lain sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Pemilu Legislatif merupakan ajang demokrasi dimana masyarakat bisa ikut andil dalam proses pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Sebagai syarat untuk bisa berpartisipasi atau menggunakan hak pilih dalam Pemilu yakni harus memenuhi beberapa persyaratan seperti halnya harus warga negara Indonesia (WNI) yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun. Yang paling mendukung untuk bisa mengikuti Pemilu yakni warga atau anggota masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah masing-masing.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Sukini :

“...Saya berpartisipasi untuk ikut Pemilu Legislatif sejak di data oleh Ketua RT di daerah saya, ketika itu saya di tanya ada berapa jumlah keluarga. Setelah itu Ketua RT menyacahkan siapa saja anggota keluarga yang bisa ikut dalam Pemilu, setelah selang beberapa hari saya di beri surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Pemerintahan pada 9 April 2009 yang akan datang...”

Hal senada juga di kemukakan oleh Ibu Suparti :

“...Semua warga negara itu mempunyai hak untuk berpolitik mas, wujud dari partisipasi politik saya yakni sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif. Saya ikut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah itu saya dan anggota keluarga di data ulang oleh petugas dari Kelurahan serta di beri undangan untuk syarat bisa mencontreng pada tanggal 9 April 2009. Sebelum hari pemungutan suara dimulai ada pihak aparat Kelurahan yang menjadi anggota PPS mensosialisasikan tata cara untuk mengikuti Pemilu, mereka datang ke RT atau RW di semua dusun Kelurahan Jatipurno. Mereka hadir apabila di setiap dusun tersebut mengadakan sarasehan RT...”

Pernyataan Ibu Sukini dan Suparti diperkuat oleh pernyataan

Bapak Suroyo selaku kepala lingkungan dusun Kuryo :

“...Benar mas, Ibu Sukini dan Suparti itu adalah warga saya di dusun Kuryo. Mereka berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 sebagai pemilih karena keduanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga ikut dalam rapat sosialisasi di tingkat RT sebelum proses pemungutan suara berlangsung...”

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 didahului dengan pendataan terhadap warga masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu yang akan diselenggarakan.

Sosialisasi untuk Pemilu merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh tim penyelenggara Pemilu yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada masyarakat, agar selama proses pemungutan suara tidak mengalami suatu masalah yang tidak diinginkan. Semua warga negara mempunyai hak politik yang bebas memilih pemimpin maupun mempunyai kedudukan di pemerintahan. Kaum perempuan sebenarnya ingin memperoleh perlakuan yang adil dalam kehidupan politik, mereka berpandangan dengan makin besarnya keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik maka bisa terwujud kesetaraan gender.

4.2 Partisipasi politik perempuan dalam susunan Panitia Pelaksanaan Pemilu

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk dan disusun atas dasar pengusulan dari pihak Kelurahan untuk dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh persetujuan atas pengusulan susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam susunan keanggotaan PPS sendiri terdiri dari Ketua, Anggota yang terdiri dari 2 orang, sekretariat yang terdiri dari sekretaris dan pelaksana. PPS mempunyai fungsi yang sangat vital dalam proses pemungutan suara yakni sebagai ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan proses pemungutan suara dalam

Pemilu, sehingga diharapkan selama pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

Dalam menjalankannya, PPS mempunyai tugas yang harus dilakukan selama proses sebelum dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara. Sebelum pemungutan dilaksanakan PPS mempunyai tugas yakni membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Jatipurno, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 8 tempat tersebar di 4 Dusun.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Setyaningsih Ariani :

“.... Saya sendiri di dalam PPS sebagai anggota. Pembentukan PPS sendiri sebenarnya atas dasar pengusulan dari pihak aparat Kelurahan, kemudian membuat surat ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk pengusulan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya secara umum fungsi dari PPS sendiri adalah sebagai fasilitas atas terselenggaranya Pemilu di tingkat Kelurahan mas...””.

Hal ini juga didukung pernyataan oleh Ibu Seh Winarni selaku

Pelaksana Sekretariat PPS :

“....Sebelum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, Ketua PPS bersama anggota membentuk KPPS dengan cara penunjukan kepada warga masyarakat yang betul-betul mampu menjalankan tugas dalam pemungutan suara. Saya sendiri di dalam PPS sebagai pelaksana sekretariat, yang bertugas sebagai bendahara. Jadi semua kegiatan yang kaitannya dengan keuangan seperti halnya honor dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan PPS itu, yang memegang dan mengatur keuangan adalah saya mas...””.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Wardi selaku kepala

Kelurahan Jatipurno :

“...Memang benar mas, Ibu Setyaningsih Ariani menjadi anggota PPS atas dasar pengusulan dari pihak kantor Kelurahan Jatipurno. Dia sangat aktif dalam menjalankan tugasnya, mulai dari sosialisasi hingga proses pemungutan suara berlangsung. Sedangkan Ibu Seh Winarni sendiri menjadi pelaksana sekretariat dalam anggota PPS, dia aktif dalam menjalankan tugas yakni semua kegiatan yang menyangkut Pemilu Legislatif dalam masalah honor yang mengatur dan memegang adalah Ibu Seh Winarni...””.

Berikut ini tugas dan fungsi PPS dalam Pemilu Legislatif :

1. Fasilitas atas terselenggaranya Pemilu.
2. Sosialisasi guna kelancaran terselenggaranya Pemilu.
3. Menerima laporan tentang pelanggaran saat berlangsungnya Pemilu, baik dalam pelanggaran kampanye maupun dalam proses pemungutan suara. Serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran di tingkat Desa atau Kelurahan.
4. Menerima hasil pemungutan suara berupa sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya dari pihak KPPS untuk di serahkan ke PPK.

2. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

KPPS adalah penyelenggara Pemilu di TPS. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, dibantu oleh 2 (dua) Petugas Keamanan TPS. KPPS sendiri di bentuk oleh PPS dengan cara penunjukan kepada warga masyarakat yang benar-benar bersedia dan mampu menjalankan tugas

serta fungsinya menurut peran masing-masing. Dalam kaitannya dengan masalah yang diangkat, penulis mengungkap beberapa informan yang telah di wawancarai yakni kaum perempuan yang ikut menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“....Saya menjadi Ketua KPPS 3 bermula dari penunjukan oleh pihak PPS, kemudian saya menerimanya dengan rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai Ketua KPPS. Sebelum pemungutan suara berlangsung keanggotaan KPPS se Kelurahan Jatipurno berkumpul untuk mengadakan rapat dengan agenda pengarahan yang dilakukan oleh PPS agar KPPS nanti dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada...”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Wardi selaku kepala Kelurahan Jatipurno :

“....Benar mas, Ibu Sri Wahyuni telah menjadi Ketua KPPS atas dasar penunjukan dari pihak PPS. Ia mengemban tugas dengan tanggung jawab karena sebelum hari pemungutan tiba KPPS sendiri sebelumnya sudah diberi arahan oleh pihak PPS dalam rapat-rapat persiapan Pemilu Legislatif tahun 2009...”.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPPS adalah sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas Pemilu.
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

4. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas lapangan, peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
5. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel.
6. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi, pengawas lapangan, dan PPK melalui PPS.
7. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas lapangan.
8. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
9. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang di berikan oleh undang-undang yang telah ada.

Dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Selain itu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Ketua KPPS dan para anggota KPPS mempunyai kewajiban masing-masing. Berikut ini tugas dan kewajiban ketua KPPS yakni :

1. Memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan proses pemberian suara.
2. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
3. Menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan.
4. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara dari pemilih.
5. Memberikan 4 (empat) jenis surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik atau tidak rusak kepada pemilih.
6. Dapat mempersilahkan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.
7. Mengumumkan kepada saksi yang hadir, partai atau calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diberi tanda dan menyatakan sah atau tidak sah suara pada surat suara.

Dalam susunan kepengurusan KPPS, selain Ketua juga ada anggota KPPS. Adapun urutan susunannya sebagai berikut :

a. Anggota KPPS kedua

Anggota KPPS kedua yakni bersama dengan KPPS ketiga membantu ketua KPPS di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Dwi Hariyani :

“....Saya menjadi anggota KPPS yakni Membantu ketua KPPS mencocokkan nomor dan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan daftar pemilih tambahan mas, selain itu juga membantu ketua KPPS memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan di umumkan kepada yang hadir dalam perolehan suara partai politik atau calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Bersama anggota ketiga membuka surat suara dan menunjukan kepada anggota KPPS ynag lain dan saksi yang hadir, Bersama anggota KPPS ketiga mengisi formulir sertifikat penghitungan suara yakni DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota...”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Wardi selaku kepala Kelurahan Jatipurno :

“...Benar mas, Ibu Dwi Hariyani telah menjadi anggota KPPS. Ia mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab, dia selalu aktif dalam rapat-rapat tertentu seperti sosialisasi Pemilu yang diadakan pihak PPS ditingkat RT serta rapat persiapan KPPS dalam menjalankan tugas saat Pemilu berlangsung...”.

b. Anggota KPPS ketiga

Anggota KPPS ketiga yakni membantu anggota KPPS kedua dan Ketua KPPS, tempatnya bersama anggota KPPS kedua bertugas membantu ketua KPPS di meja pimpinan. Yaitu memberikan tanda pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Kartyatni :

“...Bersama anggota KPPS kedua membuka surat suara dan menunjukan kepada anggota KPPS yang lain dan saksi yang hadir, dan mengamati pemberian tanda yang terdapat pada surat suara, selain itu Saya Bersama anggota KPPS kedua mengisi formulir sertifikat hasil penghitungan suara dari DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota...”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Suroyo selaku kepala Lingkungan dusun Kuryo Kelurahan Jatipurno :

“...Betul mas, Ibu Karyatni telah menjadi anggota KPPS. Dia sangat baik dalam menjalankan tugas, yakni membantu ketua KPPS pada saat proses pemungutan suara berlangsung...”.

c. Anggota KPPS keempat

Anggota KPPS keempat ini mempunyai kedudukan yang sangat vital di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS.

Sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada pemilih. Dalam melaksanakan perannya, anggota KPPS keempat mempunyai tugas yang harus di laksanakan.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Sarminah Catharina :

“...Bersama anggota KPPS kelima mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir C2 ukuran besar yang ditempel pada papan tulis dengan cara taily yaitu dengan memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut. Selain itu Saya juga membantu ketua KPPS dengan menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik dan calon anggota DPD kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, surat suara resmi atau dipalsukan dan diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul...”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Wardi selaku kepala Kelurahan Jatipurno :

“...Iya mas, Ibu Sarminah Catharina menjadi anggota KPPS. Dia bertugas menerima yang akan masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menjalankan tugas dengan baik dan tanggung jawab...”

d. Anggota KPPS kelima

Dalam susunan keanggotaan KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS), anggota kelima mempunyai tugas dan kewajiban.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“....Mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara. Yang kedua Bersama anggota KPPS keempat mencatat hasil pemungutan suara ke dalam formulir C2 ukuran besar yang ditempel pada papan tulis dengan cara cara taily yaitu dengan memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut...”.

e. Anggota KPPS keenam

Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakannya tugasnya berada di dekat kotak suara.

Adapun tugas lainnya seperti yang diungkapkan Ibu Sri Wahyuni :

“....Bersama anggota KPPS ketujuh menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPD yang telah di umumkan, kemudian yang kedua Memandu pemilih setelah memberikan suaranya menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada ketua KPPS bahwa surat suara dala keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPS. Kemudian satu demi satu surat suara dimasukkan kedalam masing-masing kotak suara, dimulai dari kotak suara untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota...”.

f. Anggota KPPS ketujuh

Dalam susunan keanggotaanya, KPPS ketujuh yakni mempunyai peran mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta

diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

Adapun tugasnya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“....Bersama anggota KPPS keenam menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPD yang telah di umumkan. Kedua yakni Memberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih yang telah memasukkan surat suara ke dalam masing-masing kotak suara...”.

4.3 Partisipasi politik perempuan sebagai Saksi dalam proses pemungutan suara.

Saksi adalah orang yang mewakili partai politik atau peserta Pemilu perseorangan untuk menjamin agar proses pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil tanpa gangguan dari unsur apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu. Sebelum menjadi saksi dalam proses pemungutan suara, saksi harus mempunyai surat mandat yang di tandatangani oleh pengurus partai politik.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sukini :

“....Saya menjadi Saksi di TPS 4 pada awalnya saya ikut dalam Parpol tertentu mas, kemudian saya di beri tugas oleh pengurus Parpol untuk menjadi Saksi dalam proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Sebelum saya menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), saya harus memberikan surat mandat kepada Ketua KPPS dari partai politik yang sudah ditanda tangani oleh pengurus tingkat Kecamatan atau Kabupaten. Setelah saya memberikan surat mandat lalu kemudian saya di beri salinan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan dari Ketua KPPS setempat. Saat pemungutan dan penghitungan suara selesai, saya beserta Ketua KPPS menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara...”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Kadimo selaku anggota Partai Politik tertentu :

“...Benar mas, Ibu Sukini menjadi Saksi dalam proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Dia juga dilatih oleh pihak Partai Politik untuk menjadi Saksi, hasilnya baik saat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang di harapkan...”.

Adapun wewenang, tugas dan kewajiban Saksi sebagai berikut :

1. Menghadiri persiapan dan pembukaan TPS.
2. Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara.
3. Menyaksikan dan mencatat proses pemungutan dan penghitungan suara.
4. Bertanya dan meminta perhatian kepada Ketua KPPS.
5. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ke KPPS.
6. Menerima salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara.

Berikut ini matriks yang memaparkan mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan di Kelurahan Jatipurno :

Matriks 3.4

Bentuk Partisipasi Politik Perempuan

Di Kelurahan Jatipurno Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009

No	Nama	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1	Ibu Seh Winarni	Pelaksana Sekretariat PPS	PPS adalah sebagai pelaksana sekretariat, yang bertugas sebagai bendahara. Jadi semua kegiatan yang kaitannya dengan keuangan seperti halnya honor dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan PPS itu, yang memegang dan mengatur keuangan.
2	Sri Wahyuni	Ketua KPPS	Ketua KPPS 3 bermula dari penunjukan oleh pihak PPS, kemudian KPPS di beri pelatihan oleh PPS bagaimana cara melakukan tugas dan kewajiban selama Pemilu Legislatif berlangsung.
3	Setyaningsih Ariani	Anggota PPS	Pembentukan PPS sendiri sebenarnya atas dasar pengusulan dari pihak aparat Kelurahan, kemudian membuat surat ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk pengusulan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya secara umum fungsi dari PPS sendiri adalah sebagai fasilitas atas terselenggaranya Pemilu di tingkat Kelurahan.
4	Suparti	Warga pemilih	Sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif. Syaratnya adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, juga harus berkewarganegaraan Indonesia.
5	Karyatni	Anggota KPPS 3	Bersama anggota KPPS kedua membuka surat suara dan menunjukan kepada anggota KPPS yang lain dan saksi yang hadir, dan mengamati pemberian tanda yang terdapat pada surat suara, selain itu Bersama anggota KPPS kedua mengisi formulir sertifikat hasil penghitungan suara dari DPR/DPD/DPRDProvinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
6	Dwi Hariyani	Anggota KPPS 2	Menjadi anggota KPPS 2 yakni Membantu ketua KPPS mencocokkan nomor dan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan daftar pemilih tambahan mas, selain itu juga membantu ketua KPPS memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

7	Sarminah Catharina	Anggota KPPS 4	Bersama anggota KPPS kelima mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir C2 ukuran besar yang ditempel pada papan tulis. Selain itu juga membantu ketua KPPS dengan menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik dan calon anggota DPD kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul.
8	Sukini	Saksi dari Partai Politik	Menjadi Saksi di TPS 4 pada awalnya ikut dalam Parpol tertentu, kemudian di beri tugas oleh pengurus Parpol untuk menjadi Saksi dalam proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Sebelum saya menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian harus memberikan surat mandat kepada Ketua KPPS dari partai politik yang sudah ditanda tangani oleh pengurus tingkat Kecamatan atau Kabupaten. Setelah itu memberikan surat mandat lalu kemudian di beri salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan dari Ketua KPPS setempat. Saat pemungutan dan penghitungan suara selesai, saksi beserta Ketua KPPS menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.

Sumber : Data Primer diolah, Juli 2009

5. Interaksi antara PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Saksi dan warga Pemilih.

Ketika peneliti berkunjung ke lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Jatipurno. Penulis berkunjung ke Kantor Kelurahan Jatipurno dan disambut oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan. Secara kebetulan pihak

Kelurahan akan mengadakan rapat sosialisasi tentang tata cara dan aturan pemungutan suara kepada semua anggota KPPS se Kelurahan Jatipurno dan dihadiri warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu.

Penulis ingin melihat bagaimana interaksi atau hubungan antara PPS dan KPPS serta KPPS dengan Saksi dan warga pemilih dalam proses pemungutan suara Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Dalam hal ini hubungan antara PPS dengan KPPS terjadi sejak KPPS sendiri dibentuk oleh pihak PPS atas dasar penunjukkan. Pada saat itu PPS mengadakan rapat di pendopo Kelurahan Jatipurno dengan KPPS dan diikuti warga setempat, kegiatan rapat ini dilaksanakan secara rutin dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2009.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Setyaningsih Ariani :

“...Hari ini kita akan mengadakan rapat dalam rangka untuk membicarakan persiapan pemungutan suara dalam Pemilu Legislatif, kami mengundang semua KPPS se Kelurahan Jatipurno dan di ikuti sebagian warga masyarakat...”

Ibu Seh Winarni, ikut menambahkan bahwa :

“...Rapat ini dengan harapan agar dilakukan secara bertahap, selesai rapat di tingkat Kelurahan akan di adakan di tingkat RT maupun RW se Kelurahan Jatipurno. Apabila di RT tiap dusun mengadakan pertemuan, pihak PPS ikut hadir untuk ikut mensosialisasikan tata cara pemungutan suara...”

Interaksi antara pihak PPS dengan KPPS tercermin dalam komunikasi dua arah karena keduanya saling bertemu dan memberi masukan tentang dalam rangka persiapan untuk menghadapi Pemilu

Legislatif tahun 2009 yang segera akan di laksanakan. Selain itu komunikasi dua arah ini juga penting untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang tidak diinginkan pada saat Pemilu berlangsung. Di dalam rapat antara pihak PPS dan KPPS membahas mengenai tata cara dan aturan-aturan yang harus di lakukan oleh KPPS saat Pemilu nanti berlangsung agar pelaksanaannya berjalan dan terlaksana dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“...Tadi kita membahas tentang tata cara atau aturan-aturan yang harus dilakukan saat Pemilu nanti berlangsung, baik dari pihak PPS maupun pihak KPPS harus menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Acara rapat tadi juga di hadiri oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu Legislatif...”.

Hal tersebut juga didukung pernyataan oleh Ibu Sarminah Catharina selaku anggota KPPS :

“...Tadi pihak KPPS di beri arahan oleh pihak PPS mengenai bagaimana para susunan anggota KPPS menjalankan tugas dan fungsi masing-masing anggota pada saat pemungutan suara berlangsung sesuai dengan undang-undang yang telah ada...”.

Interaksi juga terjadi pada saat proses kegiatan pemungutan suara yang di lakukan oleh KPPS telah berakhir, yakni pihak Ketua KPPS beserta anggotanya harus menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen-dokumen pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari itu juga.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“...Ketika proses pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saya beserta anggota KPPS yang lain menyerahkan kotak suara dan dokumen-dokumen pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS. Ketika penyerahan hasil Pemilu tersebut saya selaku Ketua KPPS di dampingi oleh pihak keamanan TPS agar hasil pemungutan dan penghitungan suara tetap terjaga keamanannya...”.

Ibu Dwi hariyani, ikut menambahkan bahwa :

“...Saya juga menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di papan pengumuman PPS, kemudian ada juga yang menyerahkan hasil sertifikat penghitungan suara kepada PPS dan langsung kepada Ketua PPK untuk penghitungan suara lewat teknologi informasi...”.

Hal ini juga di ungkapkan oleh pihak PPS yakni Ibu Setyaningsih Ariani :

“...Ketika proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, saya bersama Ketua PPS menerima kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari pihak KPPS. Selain itu kami juga menerima sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya dari KPPS untuk di umumkan di papan pengumuman PPS dan sertifikat hasil penghitungan suara juga di serahkan kepada PPK melalui PPS untuk di hitung melalui teknologi informasi...”.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa dalam musyawarah itu dilakukan evaluasi mengenai langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 yang akan berlangsung hingga proses pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Hubungan antara PPS dengan KPPS berjalan dengan kontinu artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, tergantung permasalahan apakah bersifat mendesak atau tidak. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang

menyangkut hubungan antara orang-perorangan dengan suatu kelompok antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Suatu interaksi tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Komunikasi juga terjalin antara PPS dan KPPS dengan warga masyarakat yang memperoleh hak pilih, interaksi terjalin saat pihak PPS dan KPPS mengadakan sosialisasi Pemilu di tingkat RT dan RW se Kelurahan Jatipurno. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Ibu Sukini :

“...Pada saat warga kami mengadakan sarasehan tingkat RT yang di lakukan secara rutin tiap 1 bulan sekali, pihak panitia penyelenggara Pemilu yakni PPS dan KPPS juga ikut dalam rapat sarasehan untuk mensosialisasikan kepada warga tentang bagaimana tata cara pencontrengan yang akan dilakukan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 nanti...”

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Ibu Suparti :

“...Pihak PPS juga membagikan stiker yang isinya himbauan agar warga masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 9 April 2009 dalam Pemilu Legislatif dan warga masyarakat diminta agar menciptakan suasana yang aman dan kondusif saat Pemilu berlangsung..”

Dalam pelaksanaan pemungutan suara interaksi antara pemilih dan KPPS serta Saksi juga terjadi, yakni ketika proses pemungutan suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Jatipurno.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sarminah Catharina :

“....Interaksi terjadi ketika saya bertugas menerima dan memeriksa surat pemberitahuan yang telah dibawa pemilih, kemudian saya memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan bahwa orang tersebut belum memilih. Saya menulis

nomor urut kedatangan di surat pemberitahuan dan meminta pemilih duduk di tempat yang disediakan sambil menunggu panggilan dari Ketua KPPS...”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Sri Wahyuni :

“...Komunikasi terjalin ketika saya memanggil pemilih berdasar nomor urut kedatangan dan meminta surat pemberitahuan yang dibawa pemilih dan saya serahkan kepada anggota KPPS 2 (dua) untuk di cek apakah nama pemilih sudah ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian anggota KPPS tiga (3) memberikan empat jenis surat suara dan saya tanda tangani sebelum saya serahkan kepada pemilih...”.

Ibu Sukini juga menuturkan :

“...Saya berinteraksi dengan KPPS sejak proses pemungutan dan penghitungan suara, yakni sejak pemungutan suara di mulai saya menerima salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan dari Ketua KPPS. Kemudian setelah proses pemungutan suara selesai, dilanjutkan proses penghitungan suara. Saya menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara di dalam TPS, kemudian setelah proses penghitungan suara selesai saya dan anggota KPPS menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk diserahkan kepada PPS....”.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Wardi selaku kepala

Kelurahan Jatipurno :

“...Interaksi antara PPS dan KPPS terlihat sangat baik mas, itu bisa saya lihat mulai dari rapat dalam rangka persiapan pemungutan suara hingga proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 berlangsung. Kemudian interaksi antara PPS dan warga juga terjalin ketika pihak PPS mengadakan sosialisasi di tingkat RT, interaksi juga terjalin antara warga pemilih dengan KPPS pada saat pemungutan suara berlangsung. Komunikasi juga berjalan baik antara Saksi dari Partai Politik dan KPPS ketika pemungutan suara berlangsung...”.

Dari percakapan penulis dengan warga masyarakat Kepala Kelurahan Jatipurno dapat disimpulkan bahwa interaksi yang terjadi antara KPPS dengan warga pemilih serta Saksi di TPS terjalin sangat baik, mulai dari antusias masyarakat di Kelurahan Jatipurno dalam sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh PPS di dukung KPPS setempat, itu bisa kita lihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa warga masyarakat mau menerima sosialisasi tentang tata cara mencontreng dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Kemudian selama proses pemungutan suara berlangsung, antara KPPS dan warga pemilih serta Saksi melakukan hubungan yang sangat baik.

Interaksi antara PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Saksi dan warga pemilih secara lebih jelas dapat diketahui dari matriks 3.5 berikut ini :

Matriks 3.5

Interaksi antara PPS dengan KPPS, Saksi dan warga pemilih

N o	Nama	Interaksi	Keterangan
1	Ibu Seh Winarni	PPS dan KPPS	Rapat dengan harapan agar dilakukan secara bertahap, selesai rapat di tingkat Kelurahan akan di adakan di tingkat RT maupun RW se Kelurahan Jatipurno. Apabila di RT tiap dusun mengadakan pertemuan, pihak PPS ikut hadir untuk ikut mensosialisasikan tata cara pemungutan suara.

2	Sri Wahyuni	KPPS dengan PPS, KPPS dengan Pemilih	Membahas tentang tata cara atau aturan-aturan yang harus dilakukan saat Pemilu nanti berlangsung, baik dari pihak PPS maupun pihak KPPS harus menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Acara rapat tadi juga di hadiri oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu Legislatif. Ketika proses pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saya beserta anggota KPPS yang lain menyerahkan kotak suara dan dokumen-dokumen pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS. Ketika penyerahan hasil Pemilu tersebut saya selaku Ketua KPPS di dampingi oleh pihak keamanan TPS agar hasil pemungutan dan penghitungan suara tetap terjaga keamanannya. Komunikasi terjalin ketika saya memanggil pemilih berdasar nomor urut kedatangan dan meminta surat pemberitahuan yang dibawa pemilih dan saya serahkan kepada anggota KPPS 2 (dua) untuk di cek apakah nama pemilih sudah ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian anggota KPPS tiga (3) memberikan empat jenis surat suara dan saya tanda tangani sebelum saya serahkan kepada pemilih.
3	Setyaningsih Ariani	PPS dengan KPPS	Mengadakan rapat dalam rangka untuk membicarakan persiapan pemungutan suara dalam Pemilu Legislatif, kami mengundang semua KPPS se Kelurahan Jatipurmo dan di ikuti sebagian warga masyarakat. Ketika proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, saya bersama Ketua PPS menerima kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari pihak KPPS. Selain itu kami juga menerima sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya dari KPPS untuk di umumkan di papan pengumuman PPS dan sertifikat hasil penghitungan suara juga di serahkan kepada PPK melalui PPS untuk di hitung melalui teknologi informasi.
4	Suparti	Warga pemilih dengan PPS	Pihak PPS juga membagikan stiker yang isinya himbauan agar warga masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 9 April 2009 dalam Pemilu Legislatif dan warga masyarakat diminta agar menciptakan

			suasana yang aman dan kondusif saat Pemilu berlangsung.
5	Dwi Hariyani	KPPS dengan PPS	Menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara beserta lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di papan pengumuman PPS, kemudian ada juga yang menyerahkan hasil sertifikat penghitungan suara kepada PPS dan langsung kepada Ketua PPK untuk penghitungan suara lewat teknologi informasi.
6	Sarminah Catharina	KPPS dengan PPS, KPPS dengan Pemilih	KPPS di beri arahan oleh pihak PPS mengenai bagaimana para susunan anggota KPPS menjalankan tugas dan fungsi masing-masing anggota pada saat pemungutan suara berlangsung sesuai dengan undang-undang yang telah ada. Interaksi terjadi ketika bertugas menerima dan memeriksa surat pemberitahuan yang telah dibawa pemilih, kemudian memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan bahwa orang tersebut belum memilih, menulis nomor urut kedatangan di surat pemberitahuan dan meminta pemilih duduk di tempat yang disediakan sambil menunggu panggilan dari Ketua KPPS.
7	Sukini	Warga pemilih dengan PPS, Saksi dengan KPPS	Pada saat warga mengadakan sarasehan tingkat RT yang di lakukan secara rutin tiap 1 bulan sekali, pihak panitia penyelenggara Pemilu yakni PPS dan KPPS juga ikut dalam rapat sarasehan untuk mensosialisasikan kepada warga tentang bagaimana tata cara pencontrengan yang akan dilakukan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 nanti. Berinteraksi dengan KPPS sejak proses pemungutan dan penghitungan suara, yakni sejak pemungutan suara di mulai menerima salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan dari Ketua KPPS. kemudian setelah proses penghitungan suara selesai saksi dan anggota KPPS menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk diserahkan kepada PPS.

Sumber : Data Primer diolah, Juli 2009

B. PEMBAHASAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih para orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas Pemilu juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua kelas atau ketua RT di pedesaan maupun perkotaan. Sistem Pemilu ini mempunyai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Pengertian bebas, mengandung makna setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Lebih dari itu, di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Bersifat rahasia mengandung makna, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui pihak manapun. Pengertian bersifat jujur, mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu , pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemilu Legislatif tahun 2009 di laksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya di dasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dengan peserta Pemilu adalah Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu, baik pemilihan calon legislatif maupun pemilihan presiden. Dalam menentukan calon pemilih sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) apabila warga ada yang belum ikut terdaftar. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan di bentuk PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang mempunyai fungsi yang sangat vital dalam proses pemungutan suara. Anggota PPS sendiri di bentuk berdasarkan pengusulan dari pihak Kelurahan dan di laporkan ke KPUD untuk mendapatkan persetujuan. PPS sendiri mempunyai tugas yakni membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS sendiri adalah penyelenggara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), anggota KPPS terdiri dari 7 orang dan dibantu oleh 2 petugas keamanan. KPPS di bentuk oleh PPS dengan cara penunjukan kepada warga masyarakat yang bersedia dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya menurut peran masing-masing.

Melihat proses Pemilu diatas maka benar-benar membutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat. Kesadaran dan rasa sukarela merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan partisipasi politik. Bersedia dengan sukarela untuk menjadi anggota PPS serta KPPS dan bagi

masyarakat yang mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni mencerminkan warga negara yang baik untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

Partisipasi politik merupakan syarat utama berjalannya proses demokrasi, keikutsertaan seseorang atau suatu kelompok dalam kehidupan politik sangatlah penting. Seperti keikutsertaan dalam proses Pemilihan Umum baik legislatif maupun Presiden, keikutsertaan individu atau kelompok tersebut secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan penguasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai partisipasi politik perempuan dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno, maka pendekatan yang relevan dalam pembahasan tersebut adalah pendekatan dari Max Weber. Menurut Weber sosiologi merupakan ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretativ understanding*) tindakan sosial serta antara hubungan sosial untuk sampai pada penyelesaian kausal.

Tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakan mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang. Dalam hal ini partisipasi politik perempuan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial, dimana tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi seperti menjadi pemilih atau ikut serta dalam Pemilu, ikut menjadi bagian dalam panitia pelaksanaan pemilu baik dalam Panitia Pemungutan

Suara (PPS) maupun dalam kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menjadi Saksi. Tindakan-tindakan tersebut mempunyai arti subyektif yaitu perempuan telah ikut aktif terlibat dan ambil bagian serta berpartisipasi dalam kancah politik dalam rangka Pemilu legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Tindakan dari perempuan yang ikut ambil bagian dalam Pemilu legislatif ini tentunya diarahkan kepada orang lain dalam hal ini para pemilih dan calon legislatif sebagai sasaran dari penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2009.

Weber membedakan rasionalitas sosial tersebut ke dalam empat tipe, dimana semakin rasional tindakan sosial tersebut, maka semakin mudah untuk dipahami dan ke empat tipe tersebut antara lain *Zwerkrational*, *Werkrational Action*, *Affectual Action* dan *Traditional Action*. Untuk memahami tindakan perempuan yang berpartisipasi dalam politik didasarkan atas kesadaran para perempuan tersebut akan hak-hak politiknya, menurut para perempuan ini politik bukan hanya kaum laki-laki semata namun kaum perempuan juga mempunyai hak berpolitik untuk mewujudkan kesetaraan gender. Tindakan ini merupakan tindakan sukarela, tindakan sukarela untuk ikut serta dalam pemilu legislatif atau bisa dikatakan sebagai tindakan *Zwerkrational* yaitu tindakan sosial secara murni.

Dalam tindakan ini perempuan merupakan aktor bukan hanya sekedar melihat dan menilai dalam kegiatan Pemilu. Tetapi perempuan yang berpartisipasi ini tergabung dalam organisasi baik PPS, KPPS maupun Partai

Politik peserta Pemilu sebagai bentuk perwujudan dari partisipasi politiknya. Dari sudut pendekatan sosiologi tindakan ini dilakukan untuk kesadaran pribadi (tidak sukarela) atau dengan terpaksa (perasaan tidak enak dengan masyarakat karena dia dianggap sebagai tokoh atau istri dari salah satu tokoh masyarakat) atau ada yang mempengaruhi. Tetapi hal ini dikatakan sebagai tindakan afektual (*affectual action*). Artinya dalam tindakan ini ditandai oleh perasaan atau emosi yang merupakan refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan tersebut adalah tindakan rasional karena adanya pertimbangan logis, ideologi atau kriteria lain. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian perempuan di Kelurahan Jatipurno didorong oleh perasaan emosional misalnya rasa bahwa dirinya dianggap sebagai orang yang berpengaruh atau menjadi istri salah satu tokoh masyarakat maka dirinya harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti dalam Pemilu Legislatif ataupun perasaan tidak enak untuk menolak ketika ditunjuk menjadi keanggotaan PPS, KPPS atau saksi Partai Politik.

Konsep selanjutnya dari Weber adalah konsep sebagai hubungan sosial (*social relationship*). Didefinisikan sebagai tindakan dari beberapa orang atau aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada orang lain. Tidak semua kehidupan kolektif memenuhi syarat sebagai hubungan antar sosial, dimana tidak ada saling penyesuaian (*mutual orientation*) antara orang yang satu dengan orang yang lain, maka disitu tidak ada hubungan antar sosial. Dalam konsep ini

tindakan perempuan mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam politik, dalam hal ini berhubungan dengan partisipasi dalam Pemilu legislatif tahun 2009. Tindakan ini diarahkan kepada orang lain, bagi perempuan yang menjadi anggota dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tindakannya diarahkan kepada kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 dan calon legislatif dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Sedangkan bagi pemilih tindakannya diarahkan kepada calon legislatif yang secara langsung atau tidak langsung tindakan berpartisipasi politik ini ikut dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 menentukan kebijakan publik. Hal ini memenuhi syarat sebagai hubungan sosial karena disini terjadi penyesuaian dari orang yang dituju dalam tindakan tersebut. Dalam masalah ini dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilu legislatif tahun 2009. Partisipasi ini dapat diketahui dari keikutsertaan perempuan untuk ambil bagian dari kegiatan politik seperti menjadi anggotaan dalam PPS dan KPPS maupun menjadi pengurus atau Saksi dari Partai Politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno.

Terdapat tiga teori yang termasuk dalam Paradigma Definisi Sosial yaitu teori aksi, interaksionisme simbolik dan fenomenologi. Sesuai dengan tema yang diambil dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori aksi. Adapun beberapa asumsi

fundamental teori aksi yang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk kepada karya Mac Iver Znaniecki dan Parsons adalah sebagai berikut :

1. Tindakan perempuan yang terlibat dalam Pemilu legislatif tahun 2009 dengan tujuan agar perempuan bisa ikut andil untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/ keputusan dan partisipasi dalam Pemilu. Hal ini muncul dari kesadaran akan hak politiknya, kesadaran yang tinggi bahwa warga negara yang baik itu harus menggunakan hak pilihnya yang bebas menentukan pilihan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di Pemerintahan.
2. Sebagai subyek perempuan bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yaitu bisa ikut andil untuk memperjuangkan dalam pengambilan kebijakan publik dan adanya keterwakilan dalam pemerintahan, tujuan tersebut dapat tercapai jika perempuan ikut berpartisipasi dalam dunia politik seperti halnya ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Jadi tindakan yang dilakukan perempuan ini bukanlah tanpa tujuan.
3. Dalam menjalankan partisipasi politiknya yakni Pemilu Legislatif tahun 2009 perempuan di Kelurahan Jatipurno menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini adalah dengan ikut menjadi anggota dalam PPS dan KPPS, menjadi pemilih dan menjadi saksi di TPS. Partai politik merupakan salah satu perangkat untuk menyalurkan aspirasi.

4. Kelangsungan tindakan perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam partisipasi politiknya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya. Seperti ketika menjadi keanggotaan PPS dan KPPS, menjadi Saksi maupun pemilih tidak dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
5. Dalam partisipasi politiknya, perempuan menilai, mengawasi dan mengevaluasi terhadap jalannya proses pemungutan suara. Sebagai pemilih tentunya akan memilih partai dan calon legislatif yang sesuai dengan hati nuraninya, dan sebagai Saksi akan mengawasi jalannya proses Pemungutan Suara agar terhindar dari kecurangan. Sedangkan sebagai panitia penyelenggara Pemilu akan mengevaluasi jalannya proses pemungutan suara tersebut, hal ini dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
6. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat perempuan ikut berpartisipasi dalam politik. Peran yang diambil dalam menjalankan partisipasinya selalu memperhatikan aturan-aturan yang telah disepakati agar keputusan tersebut dapat sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU maupun pemerintah atau yang telah disepakati bersama. Dengan adanya hal tersebut nantinya keputusan dari proses politik tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan optimal.

7. Hubungan sosial memerlukan teknik penemuan yang bersifat subyektif metode verstehen, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*)

Parsons sebagai pendukung utama Weber juga ikut mengembangkan teori aksi. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya individu sebagai aktor, dalam hal ini adalah perempuan di Kelurahan Jatipurno sebagai pelaku.
2. Perempuan di Kelurahan Jatipurno dipandang sebagai pembawa bagian-bagian tertentu yang dalam hal ini adalah berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 yang merupakan partisipasi politik.
3. Perempuan mempunyai alternatif tindakan, cara, alat serta teknik mencapai tujuannya. perempuan dalam partisipasi politiknya menggunakan cara pemantauan dengan menjadi Saksi Partai Politik, memilih sebagai pemilih dan mengevaluasi sebagai keanggotaan PPS dan KPPS.
4. Pada saat perempuan ikut mengambil bagian dalam partisipasi politiknya berhadapan dengan kondisi-kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuannya. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, dalam hal ini bagi pemilih menjadi bingung karena terlalu banyaknya partai atau surat suara yang terlalu besar. Bagi perempuan yang

menjadi anggota PPS dan KPPS serta saksi tentunya juga mempunyai kendala menurut tugas masing-masing.

5. Perempuan dalam menjalankan partisipasi politiknya dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma serta berbagai ide abstrak yang mempengaruhi perempuan dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini nilai-nilai atau norma yang menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk nomor dua (2) dalam dunia politik atau dalam soal kepemimpinan.

Konsep Voluntarisme Parsons dapat menjelaskan bagaimana perempuan ikut ambil bagian dan berpartisipasi politik dalam situasi yang terbatas dimana aturan dan norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Disini adalah norma tentang bagaimana mengungkapkan pendapat, tujuan dan bagaimana ikut ambil bagian dalam pengambilan sebuah kebijakan publik karena hal-hal tersebut sudah ditentukan oleh aturan yang berlaku dari KPU maupun pemerintah. Norma-norma dan aturan-aturan tersebut tidak menerapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan dalam memilih cara atau alat yang tepat dipergunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut konsep Voluntarisme ini perempuan yang berpartisipasi dalam politik merupakan pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif tindakan. Partisipasi sebagai pemilih tentunya akan mempunyai keinginan bebas untuk menentukan

pilihannya sesuai dengan hati nuraninya bebas menentukan pilihan karena hal ini merupakan hak pemilih yang bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dan diharapkan mampu mewujudkan sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Sedangkan partisipasi sebagai anggota PPS, KPPS serta Saksi mempunyai aturan yang jelas dan harus menaatinya. Bahwa PPS sendiri terbentuk atas dasar pengusulan dari kesepakatan semua warga dan KPPS terbentuk dari penunjukan pihak PPS untuk menjalankan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). PPS, KPPS serta Saksi juga mempunyai kemauan atau keinginan dalam memilih alternatif tindakan. Pada saat berperan sebagai anggota PPS dan KPPS tidak mempunyai kemauan atau keinginan bebas dalam memilih alternatif tindakan karena dibawah payung aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku, tetapi disaat anggota PPS dan KPPS menggunakan hak pilih tentunya mempunyai keinginan bebas untuk menentukan pilihannya. Sebagai Saksi dalam menjalankan tugas juga harus dibawah aturan dan petunjuk dari Partai Politik yang di ikutinya dalam proses pemungutan suara, tetapi pada saat menggunakan hak pilihnya Saksi juga mempunyai keinginan bebas dalam memilih alternatif tindakan.

Matriks 3.6
Temuan Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno
Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009

Latar Belakang	Faktor Internal dan Eksternal	Bentuk Partisipasi
<p>Latar belakang perempuan di Kelurahan Jatipurno ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah karena adanya keinginan dari kaum perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik. Karena sebagai warga negara itu mempunyai hak untuk menentukan nasib baik diri sendiri khususnya kaum perempuan dan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan peran dan mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Selain itu berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif dapat menghasilkan para anggota Legislatif yang memikirkan kepentingan rakyat.</p>	<p>Faktor Internal yakni : - Adanya partisipasi yang tinggi untuk memilih para calon anggota Legislatif yang muncul dari hati nurani. - Adanya kesadaran yang tinggi bahwa warga negara itu harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di pemerintahan.- Adanya tujuan dari wujud berpartisipasi berupa memilih calon wakil rakyat yang akan duduk dikursi pemerintahan serta berkeinginan agar perempuan mendapatkan kursi di DPR sehingga bisa menyalurkan aspirasi kaum perempuan. Faktor Eksternal yakni adanya penunjukan dan pengusulan dari pemerintah yakni KPU kepada masyarakat untuk menjadi panitia PEMILU yakni PPS dan KPPS, serta adanya pengaruh dari luar individu lain untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.</p>	<p>Ada 3 macam bentuk partisipasi politik yakni : 1. Sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif. 2. Sebagai panitia pelaksanaan Pemilu seperti halnya Sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Sebagai KPPS yakni penyelenggara Pemilu di TPS. 3. Sebagai Saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.</p>

Sumber : Data Primer diolah, Juli 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang Partisipasi Politik perempuan di Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Partisipasi Politik perempuan dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat khususnya kaum perempuan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan kaum laki-laki dalam dunia politik.

Dalam dunia politik antara perempuan dan laki-laki tidak berimbang, peran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki persentasenya sangat memperhatikan. Jika kita berbicara partisipasi politik perempuan, maka yang terjadi adalah adanya representasi perempuan yang rendah didalamnya. Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun keterlibatan perempuan di dalam proses pemungutan suara baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan sebagai penyelenggara dalam pesta demokrasi yakni Pemilu yang berfungsi memilih para calon wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Dilihat dari

serangkaian penelitian ini untuk menilai bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan kaum perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 sudah cukup baik. Setidaknya peran dan tugas yang telah di laksanakan sudah sesuai yang diinginkan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah salah satu syarat utama dari tegak dan berjalannya demokrasi adalah adanya partisipasi politik. Definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilihan Umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dan seterusnya.

Dalam kaitannya dengan masalah yang telah diangkat mengenai Partisipasi Politik Perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, terdapat berbagai partisipasi perempuan dalam proses pesta demokrasi yang telah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak politik untuk meningkatkan peran gender. Dengan

kenyataannya bahwa perempuan di Kelurahan Jatipurno kebanyakan berantusias dalam berlangsungnya Pemilu Legislatif, dengan beranggapan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik maka diharapkan kebijakan publik dan kehidupan politik bagi perempuan menjadi lebih baik.

Dapat di ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di Kelurahan Jatipurno untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah adanya partisipasi yang tinggi untuk memilih para calon anggota Legislatif yang muncul dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Adanya kesadaran yang tinggi bahwa warga negara yang baik itu harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di pemerintahan. Adanya tujuan dari wujud berpartisipasi yakni berupa memilih para calon wakil rakyat yang akan duduk dikursi pemerintahan serta berkeinginan agar kaum perempuan bisa mendapatkan kursi di DPR, sehingga bisa menyalurkan aspirasi kaum perempuan. Adanya penunjukkan dari pihak pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat Kelurahan Jatipurno untuk menjadi panitia kepengurusan dalam proses Pemilu berlangsung, misalnya dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan adanya pengaruh dari luar atau individu lain untuk berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

Terdapat tiga macam bentuk Partisipasi Politik perempuan yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno diantaranya adalah partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif, partisipasi politik perempuan sebagai panitia pelaksanaan Pemilu, partisipasi politik perempuan sebagai Saksi dalam proses pemungutan suara.

Hubungan antara PPS dan KPPS terlihat dalam komunikasi dua arah karena keduanya saling bertemu dan memberi masukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi Pemilu Legislatif yang segera akan dilaksanakan guna mengatasi masalah yang tidak diinginkan pada saat Pemilu berlangsung. Di dalam rapat antara pihak PPS dan KPPS dibahas mengenai tata cara dan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh KPPS saat Pemilu nanti berlangsung agar pelaksanaannya berjalan dan terlaksana dengan baik. Interaksi juga terjadi pada saat proses kegiatan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS telah berakhir, yakni pihak Ketua KPPS beserta anggotanya harus menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen-dokumen pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS. Hubungan antara PPS dengan KPPS berjalan dengan kontinu artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, tergantung permasalahan apakah bersifat mendesak atau tidak. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan dengan suatu kelompok antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Suatu interaksi

tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Hubungan antara KPPS dengan warga pemilih serta Saksi di TPS terjalin sangat baik, mulai dari antusias masyarakat di Kelurahan Jatipurno dalam sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh PPS di dukung KPPS setempat, itu bisa kita lihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa warga masyarakat mau menerima sosialisasi tentang tata cara mencontreng dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Kemudian selama proses pemungutan suara berlangsung, antara KPPS dan warga pemilih serta Saksi melakukan hubungan yang sangat baik.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Implikasi Empiris

Partisipasi politik perempuan merupakan suatu wadah bagi kaum perempuan dalam politik. Hal ini sangat penting karena tidak ada demokrasi yang sejati, tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pemerintahan dan pembangunan apabila tanpa adanya kesetaraan partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan di

semua bidang kehidupan dan tingkat pengambilan keputusan dalam dunia politik.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Jatipurno cukup baik.

Partisipasi politik perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kelurahan Jatipurno sangatlah penting. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keinginan kaum perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik. Menurutnyanya yang mempunyai hak politik bukan hanya kaum laki-laki semata, namun dengan perubahan zaman kaum perempuan juga harus memperoleh hak berpolitik dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah politik.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat tiga macam bentuk Partisipasi Politik perempuan yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno diantaranya adalah. **Pertama**, Partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dalam Pemilu Legislatif. Pemilu merupakan ajang demokrasi dimana masyarakat bisa ikut andil dalam proses pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Sebagai syarat untuk bisa berpartisipasi atau menggunakan hak pilih dalam Pemilu yakni harus memenuhi beberapa persyaratan seperti halnya harus warga negara Indonesia serta (WNI) yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Kedua, partisipasi politik perempuan sebagai panitia pelaksanaan Pemilu. Sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) yakni dibentuk dan disusun atas dasar pengusulan dari pihak Kelurahan untuk dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh persetujuan atas pengusulan susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPS mempunyai fungsi yang sangat vital dalam proses pemungutan suara yakni sebagai ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan proses pemungutan suara dalam Pemilu. Sebagai KPPS yakni penyelenggara Pemilu di TPS. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, dibantu oleh 2 (dua) Petugas Keamanan TPS. KPPS sendiri dibentuk oleh PPS dengan cara penunjukkan kepada warga masyarakat yang benar-benar bersedia dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya menurut peran masing-masing.

Ketiga, partisipasi politik perempuan sebagai Saksi dalam proses pemungutan suara. Saksi adalah orang yang mewakili partai politik atau peserta Pemilu perseorangan untuk menjamin agar proses pemungutan dan penghitungan suara dalam saat Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil tanpa gangguan dari unsur apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu.

2. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi, sedangkan teori yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah teori yang terdapat dalam paradigma Definisi Sosial yakni teori aksi.

Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teori yang digunakan dalam penelitian dimana pendekatan ini menekankan pada Partisipasi Politik perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Di dalam teori aksi menekankan pada tindakan sosial dari Max Weber dan memandang manusia adalah sebagai aktor yang kreatif dan realitas sosialnya. Sebab dilihat dari tindakan perempuan di Kelurahan Jatipurno dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di wujudkan dalam bentuk partisipasi seperti menjadi pemilih atau ikut serta dalam Pemilu, ikut menjadi bagian dalam panitia pelaksanaan pemilu baik dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun dalam kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menjadi Saksi.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bagaimana tindakan-tindakan tersebut mempunyai arti subyektif yaitu perempuan telah ikut aktif terlibat dan ambil bagian serta berpartisipasi dalam kancah politik dalam rangka Pemilu legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno. Tindakan dari perempuan yang ikut ambil bagian dalam Pemilu legislatif ini tentunya di arahkan kepada orang lain dalam hal ini para pemilih dan

calon legislatif sebagai sasaran dari penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2009.

Menurut Parsons, sebagai pendukung teori aksi dari Max Weber, istilah aksi atau *action* menyatakan secara langsung suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan individu ditentukan oleh kemampuannya. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai Voluntarisme. Secara singkat Voluntarisme merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuannya. Manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan atau keputusan antara tujuan yang berbeda-beda dan alat-alatnya untuk mencapai tujuan tersebut. Lingkungan mempengaruhi faktor dalam membuat keputusan. Jadi tindakan tersebut terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari obyek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai-nilai.

Dalam penulisan ini sebagai aktor adalah kaum perempuan di Kelurahan Jatipurno yang berpartisipasi politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Perempuan yang berpartisipasi ini tergabung dalam organisasi baik PPS, KPPS maupun Partai Politik peserta Pemilu sebagai bentuk perwujudan dari partisipasi politiknya. Tindakan perempuan yang terlibat dalam Pemilu legislatif dengan tujuan agar perempuan bisa ikut andil untuk memperjuangkan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan/ keputusan dan partisipasi dalam Pemilu. Hal ini muncul dari kesadaran

akan hak politiknya, kesadaran yang tinggi bahwa warga negara yang baik itu harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di Pemerintahan.

Jadi dengan menggunakan teori aksi dalam penelitian ini sangat mendukung penelitian.

3. Implikasi Metodologis

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat Partisipasi Politik perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kelurahan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif ini, maka peneliti menjadi instrumen penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data lengkap dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Keterbatasan yang dimiliki peneliti antara lain :

- a. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang politik.
- b. Kurang mengenalnya peneliti dengan seluruh keanggotaan PPS dan KPPS, serta warga masyarakat di Kelurahan Jatipurno. Sehingga peneliti hanya menggunakan informasi dari beberapa informan

anggota PPS dan KPPS serta sebagian warga masyarakat yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini informasi dipilih berdasarkan *purposive sampling* dan dipilih disesuaikan dengan derajat kebutuhan data. Dengan menggunakan teknik tersebut terasa cukup efektif sebab peneliti dapat menemukan informasi yang tepat dengan permasalahan penelitian. Informasi dalam penelitian ini adalah Anggota PPS beserta Sekretariat Pelaksana, Ketua KPPS beserta para anggotanya, Saksi dari Partai Politik dan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

Untuk keperluan triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber data yang diperoleh dari informan lain agar mempunyai validitas tinggi. Sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa interaktif. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan data, karena data yang diperoleh selalu berkembang di lapangan, maka penulis selalu membuat reduksi data dan kajian data. Penulis membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di lapangan, kemudian diikuti dengan penyusunan sajian data yang berupa contoh atau uraian yang sistematis.

Setelah pengumpulan data berakhir, tindakan penelitian selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam penulisan reduksi data dan sajian data. Secara metodologis, hasil penelitian ini tidak dapat dibuat generalisasi dan hanya

berlaku pada lokasi penelitian. Namun dari hasil penelitian yang ada mampu mengungkapkan realitas secara lebih mendalam sehingga memungkinkan memberi gambaran realitas sebagaimana adanya.

C. SARAN

Dengan selesainya penelitian ini bukan berarti tidak terdapat ruang-ruang perbaikan. Oleh karena itu penelitian dengan tema yang serupa dapat dilakukan dengan lebih baik oleh peneliti lain di masa datang. Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan yakni :

1. Untuk Pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. Dalam menjalankan peran dan tugas, hendaknya PPS semakin aktif dan tanggung jawab dalam Pemilu Legislatif mendatang. karena PPS sendiri sebenarnya menjadi ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam berlangsungnya Pemilu Legislatif.
- b. Pihak PPS perlu melakukan sosialisasi tentang tata cara berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif sedini mungkin, agar pada saat proses pemungutan suara berlangsung warga masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan.

2. Untuk Pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. Melakukan peran dan tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang dan kewajiban masing-masing dalam keanggotaan KPPS.

- b. Meningkatkan dan terjadinya komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan pihak PPS, karena antara KPPS dan PPS yang menentukan jalannya proses demokrasi di tingkat Desa maupun Kelurahan.

3. Untuk Pihak Warga Pemilih

- a. Dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, masyarakat hendaknya berperan aktif dalam menggunakan hak politiknya. Misalnya dalam proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), selama ini petugaslah yang mendatangi warga untuk di daftar sebagai daftar pemilih sehingga warga terkesan pasif kalau tidak didatangi juga tidak akan mendaftar. Selain itu warga masyarakat juga tidak pernah melihat di papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap yang ada di kantor Kelurahan Jatipurno.
- b. Meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu Legislatif yang akan datang, seperti halnya masyarakat jangan membiasakan Golput dalam Pemilu yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri dan bangsa.

4. Untuk Pihak Saksi.

- a. Melakukan peran dan tugas dengan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang.
- b. Meningkatkan kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas selama proses pemungutan suara dalam Pemilu Legislatif berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasapoetra, Hartini, G.1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miriam Budiarto (ed), *Partisipasi dan Partai Politik, Yayasan Obor* Jakarta, 1998.
- Moleong, Lexy.J (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-13, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko, Joko.2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*.Semarang: LP21 Press.
- Ritzer, George.2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali.
- Slamet, Yulius, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. **Surakarta** : Sebelas Maret University Press.
- Suparno, Indriyati. 2005. *Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*. Surakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo.HB,2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press
- Tjokrowinoto, Moeljarto.1978. *Beberapa Teknik didalam Hubungan Kerja*, Yogyakarta : BPA Universitas Gajah Mada.

SUMBER LAIN :

- Monografi Kelurahan Jatipurno Tahun 2008
- Buku pintar KPPS dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Jurnal Perempuan 34, 2001
- Data Perempuan dan Pemilu CETRO, 2001
- Pranab Kumar Panday, www.bd-election.php, 2008
- Soryarmoorthy Renjini, www.keralapolitical.com, 2008
- www.menegpp.go.id

- www.ppsw.or.id (Pusat Pengembangan Sumber daya Wanita)
- www.pelita.go.id (Pengertian dari Pemilu)
- www.turwahyudin.wordpress.com
- www.wikipedia.org

